

MODUL AJAR PANCASILA

Jilid 1



Disusun oleh:
Fadhlul Mubarak, S.Si., M.Si., Ph.D.

Editor:
Vinny Yuliani Sundara, S.Si., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum,

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dasar dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus pada kerangka konseptual pendidikan Pancasila dibahas terkait pengertian Pancasila, sejarah Pancasila, nilai-nilai Pancasila, pendekatan pembelajaran pendidikan Pancasila, dan evaluasi pendidikan Pancasila. Selanjutnya pada bab landasan pendidikan pancasila dibahas terkait landasan historis, kultural, yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, dan paedagogis.

Akhir kata, Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga buku ini memberi kontribusi yang berarti bagi perjalanan pembelajaran dan pencapaian Anda dalam memahami dan menerapkan Pancasila.

Selamat membaca!

Hormat Saya,

Fadhlul Mubarak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN PANCASILA	1
1.1 Tujuan Pembelajaran.....	1
1.2 Pengertian Pancasila	2
1.3 Sejarah Pancasila.....	9
1.4 Nilai-nilai Pancasila.....	15
1.5 Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Pancasila	22
1.6 Evaluasi Pendidikan Pancasila	27
BAB 2 LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA	35
2.1 Tujuan Pembelajaran.....	35
2.2 Landasan Historis	37
2.3 Landasan Kultural	42
2.4 Landasan Yuridis	47
2.5 Landasan Filosofis	55
2.6 Landasan Sosiologis.....	64
2.7 Landasan Psikologis.....	72
2.8 Landasan Paedagogis	80
REFERENSI	91
BIOGRAFI PENULIS.....	92

BAB 1

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN PANCASILA

1.1 Tujuan Pembelajaran

Bab kerangka konseptual pendidikan pancasila ini terdiri dari 5 subbab materi diantaranya pengertian pancasila, sejarah pancasila, nilai-nilai pancasila, pendekatan pembelajaran pendidikan pancasila, dan evaluasi pendidikan pancasila. Masing-masing subbab tersebut memiliki tujuan pembelajaran diantara:

1. Pengertian pancasila
 - a. Memahami makna dan hakikat pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.
 - b. Mengetahui rumusan pancasila dan kedudukannya dalam sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia.
 - c. Menjelaskan hubungan pancasila dengan tujuan nasional bangsa Indonesia.
 - d. Mampu menganalisis relevansi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi.
2. Sejarah Pancasila
 - a. Memahami proses rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
 - b. Mengetahui peran tokoh-tokoh pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila.
 - c. Menjelaskan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.
 - d. Mampu menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila.
 - e. Menjelaskan makna dan pentingnya Hari Lahir Pancasila.
3. Nilai-nilai Pancasila
 - a. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.

- b. Mampu menjelaskan hubungan antar nilai-nilai Pancasila yang saling berkaitan dan menjiwai.
 - c. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - d. Menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
 - e. Mampu menyelesaikan masalah dan konflik dengan menggunakan pendekatan Pancasila.
4. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Pancasila
- a. Memahami berbagai pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam Pendidikan Pancasila.
 - b. Mampu memilih dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang tepat dan efektif dalam proses pembelajaran PPKn.
 - c. Mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang dipilih.
 - d. Menilai efektivitas penerapan pendekatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran PPKn.
5. Evaluasi Pendidikan Pancasila
- a. Memahami tujuan dan jenis-jenis evaluasi Pendidikan Pancasila.
 - b. Mampu memilih dan menerapkan teknik evaluasi yang tepat dan efektif dalam menilai pencapaian hasil belajar peserta didik.
 - c. Menganalisis hasil evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik.
 - d. Memperbaiki proses pembelajaran PPKn berdasarkan hasil evaluasi.
 - e. Mengembangkan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan jenis evaluasi.

1.2 Pengertian Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, terdiri dari kata "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti dasar atau asas.

Secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai "lima dasar". Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu:

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Makna Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan yang maha esa: mengakui dan meyakini keberadaan tuhan yang maha esa sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala kekuatan.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Persatuan Indonesia: menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghargai perbedaan dan keragaman yang ada.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: menerapkan sistem demokrasi pancasila dengan musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat bersama.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dalam semua aspek kehidupan.

Evaluasi

1. Pancasila berasal dari kata "Panca" yang berarti lima dan "Sila" yang berarti dasar. Apakah pengertian Pancasila yang tepat?
 - A. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima dasar.

- B. Pancasila adalah lima dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.
- C. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima dasar negara.
- D. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman hidup.

Pembahasan: Jawaban A. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima dasar. Pancasila memang terdiri dari lima dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.

2. Siapakah yang pertama kali mencetuskan istilah "Pancasila"?

- A. Ir. Soekarno
- B. Mohammad Hatta
- C. Ki Hajar Dewantara
- D. Mr. Supomo

Pembahasan: Jawaban D. Mr. Supomo mencetuskan istilah "Pancasila" dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945. Saat itu, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya yang berjudul "Dasar Negara Indonesia". Dalam pidatonya, dia menjelaskan lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

3. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara?

- A. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia.
- B. Pancasila menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia.
- C. Pancasila menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

D. Semua jawaban benar.

Pembahasan: Jawaban D. Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila.
2. Menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi dasar untuk merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan di Indonesia.
4. Salah satu ciri khas Pancasila yang membedakannya dengan ideologi lain adalah...
 - A. Pancasila berdasarkan pada agama tertentu.
 - B. Pancasila bersifat totaliter.
 - C. Pancasila bersifat materialistik.
 - D. Pancasila bersifat terbuka dan fleksibel.

Pembahasan: Jawaban D. Pancasila bersifat terbuka dan fleksibel artinya Pancasila dapat diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pancasila tidak kaku dan statis, melainkan dapat diadaptasi dengan kondisi yang ada tanpa mengubah nilai-nilai fundamentalnya.

5. Apa arti kata "Pancasila" secara etimologis?
 - A. Lima dasar
 - B. Lima hukum
 - C. Lima prinsip
 - D. Lima sila

Pembahasan: Jawaban A. Secara etimologis, kata "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila secara harfiah dapat diartikan sebagai lima dasar atau lima prinsip yang menjadi landasan

utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing menggambarkan nilai-nilai luhur yang harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut adalah: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki makna yang dalam dan menggambarkan nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia?

- A. Sebagai panduan kehidupan sehari-hari
- B. Sebagai sumber dari segala sumber hukum
- C. Sebagai lambang negara
- D. Sebagai sistem pemerintahan

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia, yang berarti Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah. Setiap hukum dan kebijakan yang dibuat harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila memastikan bahwa segala aspek kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan pandangan hidup. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan, memiliki kewajiban untuk menghormati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila menjadi perekat yang menyatukan seluruh komponen bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

7. Siapa yang pertama kali mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?

- A. Soekarno
- B. Mohammad Hatta
- C. Soepomo
- D. Muhammad Yamin

Pembahasan: Jawaban A. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan lima prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Lima prinsip yang diusulkan Soekarno adalah: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Usulan ini kemudian diterima dan dijadikan dasar negara Indonesia. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno kemudian mengalami beberapa penyempurnaan dalam proses perumusan, yang akhirnya ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi dasar filosofis negara yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dan menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Apa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara?

- A. Mengarahkan perilaku individu
- B. Menjadi identitas kebangsaan
- C. Menentukan sistem politik
- D. Mengatur ekonomi negara

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai identitas kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan karakter dan kepribadian bangsa, serta sebagai sumber inspirasi dalam penyusunan berbagai kebijakan nasional. Pancasila juga berperan dalam mempersatukan seluruh

elemen masyarakat Indonesia, meskipun memiliki latar belakang yang beragam. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan menjadi landasan dalam membangun identitas kebangsaan yang kuat dan kokoh. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Pancasila juga menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

9. Bagaimana Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum di Indonesia?

- A. Melalui kebijakan presiden
- B. Melalui peraturan daerah
- C. Melalui pembukaan UUD 1945
- D. Melalui keputusan MK

Pembahasan: Jawaban C. Pancasila dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum di Indonesia melalui Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dan arah bagi pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap hukum yang dibuat harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang memastikan bahwa setiap aturan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini memastikan bahwa penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang

sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, serta menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar filosofis, tetapi juga operasional dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.

10. Apa peran Pancasila dalam pembentukan identitas nasional Indonesia?
- A. Membatasi budaya asing
 - B. Menyediakan kerangka kerja hukum
 - C. Mengembangkan ekonomi nasional
 - D. Menyatukan berbagai suku dan budaya

Pembahasan: Jawaban D. Pancasila berperan penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia dengan menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari beragam kelompok etnis dan budaya, Indonesia memerlukan sebuah landasan yang mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Pancasila, dengan kelima silanya, menyediakan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui keberadaan dan penghormatan terhadap berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Nilai-nilai ini membentuk identitas nasional yang inklusif dan toleran, serta menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi perekat yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam satu identitas nasional yang kokoh dan kuat.

1.3 Sejarah Pancasila

Istilah "Pancasila" pertama kali digagas oleh M. Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI (Badan

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Namun, rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang berasal dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila". Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan lima dasar negara yang ia sebut "Pancasila", yaitu:

1. Kebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Musyawarah Mufakat
4. Keadilan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 diwarnai dengan berbagai ide dan pemikiran tentang dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh yang menyampaikan gagasannya dalam sidang tersebut antara lain:

1. Mohammad Yamin: Mengusulkan lima dasar negara, yaitu: Perikemanusiaan, Kebangsaan, Musyawarah Mufakat, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Prof. Mr. Supomo: Mengusulkan dasar negara yang disebut "Dasar Negara Pancasila", terdiri dari Persatuan Indonesia, Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Kerakyatan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Mr. Radjiman Wedyodiningrat: Mengusulkan dasar negara yang disebut "Dasar Negara Gotong Royong", terdiri dari Persatuan, Kemerdekaan, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah, yang dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila". Rumusan Pancasila Soekarno ini kemudian diakui dan diterima oleh para anggota BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno merumuskan lima dasar negara yang ia sebut "Pancasila", yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengesahan Pancasila ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Evaluasi

1. Siapakah yang pertama kali mencetuskan istilah "Pancasila"?
 - A. Ir. Soekarno
 - B. Mohammad Hatta
 - C. Ki Hajar Dewantara
 - D. Mr. Supomo

Pembahasan: Jawaban D. Mr. Supomo mencetuskan istilah "Pancasila" dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945. Saat itu, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya yang berjudul "Dasar Negara Indonesia". Dalam pidatonya, dia menjelaskan lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

2. Kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia?
 - A. 17 Agustus 1945
 - B. 18 Agustus 1945
 - C. 19 Agustus 1945
 - D. 20 Agustus 1945

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang kedua BPUPKI. Sidang tersebut menghasilkan Piagam Jakarta, yang merupakan cikal bakal Pancasila.

3. Berapa kali Pancasila mengalami perubahan rumusan?

- A. 1 kali
- B. 2 kali
- C. 3 kali
- D. 4 kali

Pembahasan: Jawaban A. Pancasila hanya mengalami perubahan rumusan satu kali, yaitu pada sila pertama. Rumusan awal sila pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Rumusan tersebut kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing bangsa".

4. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada tanggal...

- A. 27 Mei 1945
- B. 28 Mei 1945
- C. 29 Mei 1945
- D. 30 Mei 1945

Pembahasan: Jawaban A. BPUPKI dibentuk pada tanggal 27 Mei 1945 atas perintah dari Kaisar Jepang. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia.

5. Sidang BPUPKI yang membahas tentang dasar negara Indonesia berlangsung selama...

- A. 2 hari
- B. 3 hari
- C. 4 hari
- D. 5 hari

Pembahasan: Jawaban C. Sidang BPUPKI yang membahas tentang dasar negara Indonesia berlangsung selama 4 hari, yaitu dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para

anggota BPUPKI menyampaikan berbagai ide dan gagasan tentang dasar negara.

6. Pancasila sebelum ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dikenal dengan nama...

- A. Piagam Jakarta
- B. Pancasila Dasar Negara
- C. Rancangan Dasar Negara
- D. Undang-Undang Dasar Negara

Pembahasan: Jawaban A. Piagam Jakarta adalah hasil rumusan sidang BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta memuat lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Namun, Piagam Jakarta tidak disetujui oleh semua pihak, sehingga harus dilakukan beberapa perubahan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

7. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam merumuskan Pancasila adalah...

- A. Ir. Soekarno
- B. Mohammad Hatta
- C. Ki Hajar Dewantara
- D. Moh. Yamin

Pembahasan: Jawaban E. Moh. Yamin adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam merumuskan Pancasila. Dia menyampaikan pidatonya yang berjudul "Gempuran Pancasila" pada tanggal 1 Juni 1945, di mana dia menjelaskan lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

8. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam...

- A. Sidang BPUPKI
- B. Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
- C. Sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- D. Sidang Konstituante

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang

tersebut menghasilkan UUD 1945, yang di dalamnya tercantum Pancasila sebagai dasar negara.

9. Siapakah tokoh yang pertama kali mengusulkan nama "Pancasila" sebagai dasar negara?

A. Mohammad Hatta

B. Soekarno

C. Supomo

D. Mohammad Yamin

Pembahasan: Jawaban B. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal dengan nama "Lahirnya Pancasila." Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ia mengemukakan lima prinsip dasar yang diusulkannya sebagai dasar negara, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno menyebut kelima prinsip ini dengan nama "Pancasila." Nama "Pancasila" sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana "Panca" berarti lima dan "Sila" berarti prinsip atau asas. Pidato Soekarno ini kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena mengemukakan dasar filosofis dan ideologis bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

10. Kapan Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara?

A. 1 Juni 1945

B. 17 Agustus 1945

C. 18 Agustus 1945

D. 27 Desember 1949

Pembahasan: Jawaban C. Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada hari tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang

salah satu agendanya adalah mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang baru merdeka. Dalam Pembukaan UUD 1945, tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan hasil dari konsensus dan perdebatan panjang yang terjadi dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lima sila inilah yang menjadi dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia.

1.4 Nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala kekuatan. Nilai ini mewajibkan setiap manusia untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, serta menghormati hak asasi manusia untuk memeluk agama dan beribadah tanpa paksaan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan bernilai. Nilai ini menekankan perlakuan yang adil dan beradab antar sesama manusia, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan status sosial. Keadilan dan peradaban menjadi landasan dalam interaksi sosial dan penyelesaian konflik.

3. Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perbedaan. Nilai ini mewajibkan setiap warga negara untuk mengutamakan kepentingan bersama dan menghindari perpecahan yang dapat merenggut persatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kerakyatan) menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Nilai ini mewajibkan penggunaan musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat bersama dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila menjadi sistem politik yang mengedepankan hikmat kebijaksanaan dan kearifan lokal dalam mewujudkan kepentingan rakyat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Keadilan Sosial) menekankan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Nilai ini mewajibkan pemerataan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Keadilan sosial menjadi tujuan bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil.

Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah individu, masyarakat, maupun negara. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila:

1. Individu: Menjalankan ibadah sesuai keyakinan, menghormati hak orang lain, bersikap toleran, gotong royong, dan menjaga persatuan.

2. Masyarakat: Melestarikan budaya lokal, menyelesaikan konflik dengan musyawarah mufakat, membantu sesama yang membutuhkan, dan menjaga kebersihan lingkungan.
3. Negara: Menegakkan hukum dan keadilan, menyediakan layanan publik yang merata, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Nilai-nilai Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena:

1. Menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Membentuk karakter bangsa yang bermoral, berakhlak, dan bermartabat.
3. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
4. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Evaluasi

1. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pada...
 - A. Kewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
 - B. Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - C. Toleransi antarumat beragama dan saling menghormati perbedaan keyakinan.
 - D. Pentingnya keyakinan spiritual dalam kehidupan manusia.

Pembahasan: Jawaban C. Toleransi antarumat beragama dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Sila pertama Pancasila menekankan pada pentingnya toleransi antarumat beragama dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Hal ini berarti setiap orang bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Penting untuk diingat bahwa toleransi bukan berarti

mencampuradukkan agama, melainkan menghargai hak orang lain untuk memeluk agama yang berbeda.

2. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mewajibkan kita untuk...
 - A. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain.
 - B. Mengabaikan hak dan kewajiban orang lain.
 - C. Memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat.
 - D. Memaksakan kehendak kita kepada orang lain.

Pembahasan: Jawaban C. Sila kedua Pancasila mewajibkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat. Hal ini berarti kita harus menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan diskriminasi, dan membantu mereka yang membutuhkan. Kita juga harus menghargai martabat manusia dan tidak memperlakukan mereka dengan semena-mena.

3. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mendorong kita untuk...
 - A. Memicu perpecahan dan perselisihan antarumat beragama.
 - B. Menjaga kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bangsa.
 - C. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia.
 - D. Memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme demi kemajuan bangsa.

Pembahasan: Jawaban D. Memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme demi kemajuan bangsa. Sila ketiga Pancasila mendorong kita untuk memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme demi kemajuan bangsa. Hal ini berarti kita harus mencintai tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bendera Merah Putih, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kita juga harus bersatu padu dan saling membantu untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

4. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mewajibkan kita untuk...
- A. Memaksakan kehendak kita kepada orang lain dalam musyawarah.
 - B. Mengabaikan pendapat dan suara minoritas dalam pengambilan keputusan.
 - C. Mencari solusi terbaik melalui musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat.
 - D. Melakukan tindakan anarkis dan kerusuhan jika pendapat kita tidak diterima.

Pembahasan: Jawaban C. Mencari solusi terbaik melalui musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat. Sila keempat Pancasila mewajibkan kita untuk mencari solusi terbaik melalui musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat. Hal ini berarti kita harus saling menghormati pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan pendapat kita. Kita harus berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi dan pertukaran pendapat yang konstruktif.

5. Sikap yang mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila adalah...
- A. Memaksa orang lain untuk memeluk agama kita.
 - B. Mencela dan menghina agama orang lain.
 - C. Menghargai perbedaan keyakinan antarumat beragama.
 - D. Mempertanyakan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pembahasan: Jawaban C. Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Hal ini berarti kita harus menerima dan menghargai keyakinan orang lain, meskipun berbeda dengan keyakinan kita. Pilihan jawaban A, B, D, dan E bertentangan dengan nilai toleransi dan saling menghormati.

6. Sikap yang mencerminkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam sila kedua Pancasila adalah...
- A. Membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.
 - B. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain.
 - C. Memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat.
 - D. Mengintimidasi dan menindas orang lain yang lebih lemah.

Pembahasan: Jawaban C. Sila kedua Pancasila mewajibkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat. Hal ini berarti kita harus menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan diskriminasi, dan membantu mereka yang membutuhkan. Pilihan jawaban A, B, D, dan E bertentangan dengan nilai keadilan dan martabat manusia.

7. Sikap yang mencerminkan nilai Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila adalah...
- A. Memicu perpecahan dan perselisihan antarumat beragama.
 - B. Menjaga kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bangsa.
 - C. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia.
 - D. Memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme demi kemajuan bangsa.

Pembahasan: Jawaban D. Sila ketiga Pancasila mendorong kita untuk memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme demi kemajuan bangsa. Hal ini berarti kita harus mencintai tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bendera Merah Putih, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Pilihan jawaban A, B, dan E bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

8. Sikap yang mencerminkan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam sila keempat Pancasila adalah...

- A. Memaksakan kehendak kita kepada orang lain dalam musyawarah.
- B. Mengabaikan pendapat dan suara minoritas dalam pengambilan keputusan.
- C. Mencari solusi terbaik melalui musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat.
- D. Melakukan tindakan anarkis dan kerusuhan jika pendapat kita tidak diterima.

Pembahasan: Jawaban C. Sila keempat Pancasila mewajibkan kita untuk mencari solusi terbaik melalui musyawarah mufakat untuk mencapai mufakat. Hal ini berarti kita harus saling menghormati pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan pendapat kita. Kita harus berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi dan pertukaran pendapat yang konstruktif. Pilihan jawaban A, B, D, dan E bertentangan dengan nilai demokrasi dan musyawarah mufakat.

9. Sikap yang mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah...
- A. Memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita.
 - B. Mencela dan menghina agama orang lain.
 - C. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - D. Meragukan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pembahasan: Jawaban C. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Hal ini berarti kita harus menerima dan menghargai keyakinan orang lain, meskipun berbeda dengan keyakinan kita. Pilihan jawaban A, B, D, dan E bertentangan dengan nilai toleransi dan saling menghormati. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap keyakinan orang lain.

10. Sikap yang mencerminkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan bermasyarakat adalah...
- A. Membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.
 - B. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain.
 - C. Memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat.
 - D. Mengintimidasi dan menindas orang lain yang lebih lemah.

Pembahasan: Jawaban C. Sila kedua Pancasila mewajibkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat. Hal ini berarti kita harus menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan diskriminasi, dan membantu mereka yang membutuhkan. Pilihan jawaban A, B, D, dan E bertentangan dengan nilai keadilan dan martabat manusia. Memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat merupakan wujud nyata dari nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5 Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila (PPKn) merupakan mata pelajaran penting dalam kurikulum pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tepat dan efektif. Terdapat berbagai jenis pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam PPKn, antara lain:

1. Pendekatan Saintifik: Pendekatan ini menekankan pada proses pembelajaran yang berbasis pada penyelidikan dan penemuan.
2. Peserta didik didorong untuk aktif mencari informasi, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.
3. Pendekatan Kontekstual: Pendekatan ini menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik.
4. Hal ini membantu peserta didik memahami makna dan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan mereka.

5. Pendekatan Kooperatif: Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang dilakukan secara kelompok.
6. Peserta didik bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan pembelajaran bersama.
7. Pendekatan Problem Based Learning (PBL): Pendekatan ini menggunakan permasalahan sebagai titik awal pembelajaran.
8. Peserta didik didorong untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Pilihan pendekatan pembelajaran yang tepat dalam PPKn tergantung pada beberapa faktor, seperti:

1. Tujuan pembelajaran: Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai akan menentukan pendekatan yang paling sesuai.
2. Karakteristik peserta didik: Guru perlu mempertimbangkan usia, kemampuan, dan minat peserta didik dalam memilih pendekatan pembelajaran.
3. Materi pembelajaran: Sifat dan kompleksitas materi pembelajaran juga perlu dipertimbangkan dalam memilih pendekatan pembelajaran.
4. Ketersediaan sumber daya: Ketersediaan sumber daya belajar, seperti buku, media pembelajaran, dan teknologi, turut memengaruhi pilihan pendekatan pembelajaran.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan pendekatan pembelajaran dalam PPKn:

1. Pendekatan Saintifik: Guru dapat menggunakan metode eksperimen, observasi, dan simulasi untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai Pancasila.
2. Pendekatan Kontekstual: Guru dapat mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan peristiwa-peristiwa terkini atau isu-isu sosial yang sedang berkembang di masyarakat.

3. Pendekatan Kooperatif: Guru dapat memberikan tugas kelompok yang mengharuskan peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan menerapkan nilai-nilai Pancasila.
4. Pendekatan Problem Based Learning (PBL): Guru dapat memberikan permasalahan kepada peserta didik yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kasus intoleransi atau diskriminasi.

Evaluasi

1. Pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk memahami dan menganalisis konsep dan teori Pancasila secara logis dan sistematis disebut dengan pendekatan apa?
 - A. Saintifik
 - B. Normatif
 - C. Yuridis
 - D. Sosiokultural

Pembahasan: Jawaban A. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami konsep dan teori Pancasila.

2. Berikut ini yang termasuk metode pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berlandaskan pendekatan saintifik adalah:
 - A. Ceramah
 - B. Diskusi kelompok
 - C. Studi kasus
 - D. Simulasi

Pembahasan: Jawaban C. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok.

3. Pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menekankan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri

siswa melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan karakter, penanaman moral, dan pengembangan budi pekerti disebut dengan pendekatan apa?

- A. Saintifik
- B. Normatif
- C. Yuridis
- D. Sosiokultural

Pembahasan: Jawaban B. Pendekatan normatif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pembentukan karakter dan moral.

4. Berikut ini yang termasuk metode pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berlandaskan pendekatan normatif adalah:

- A. Penelitian
- B. Role playing
- C. Debat
- D. Penelitian dan debat

Pembahasan: Jawaban B. Pendekatan normatif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti role playing, cerita inspiratif, dan debat.

5. Pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menekankan pada pemahaman konteks sosial budaya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila disebut dengan pendekatan apa?

- A. Saintifik
- B. Normatif
- C. Yuridis
- D. Sosiokultural

Pembahasan: Jawaban D. Pendekatan sosiokultural dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membantu siswa memahami konteks sosial budaya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

6. Manakah pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk memahami dan menganalisis konsep dan teori Pancasila secara logis dan sistematis?

- A. Pendekatan Saintifik
- B. Pendekatan Normatif
- C. Pendekatan Yuridis
- D. Pendekatan Sosiokultural

Pembahasan: Jawaban A. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami konsep dan teori Pancasila melalui metode seperti studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok.

7. Berikut ini yang termasuk metode pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berlandaskan pendekatan saintifik adalah:

- A. Ceramah
- B. Diskusi kelompok
- C. Studi kasus
- D. Ceramah dan studi kasus

Pembahasan: Jawaban C. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok.

8. Pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menekankan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan karakter, penanaman moral, dan pengembangan budi pekerti disebut dengan pendekatan apa?

- A. Pendekatan Saintifik
- B. Pendekatan Normatif
- C. Pendekatan Yuridis
- D. Pendekatan Sosiokultural

Pembahasan: Jawaban B. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa melalui berbagai

kegiatan yang berfokus pada pembentukan karakter dan moral, seperti role playing, cerita inspiratif, dan debat.

9. Berikut ini yang termasuk metode pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berlandaskan pendekatan normatif adalah:

- A. Penelitian
- B. Role playing
- C. Cerita inspiratif
- D. Penelitian dan cerita inspiratif

Pembahasan: Jawaban B. Pendekatan normatif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti role playing, cerita inspiratif, dan debat.

10. Pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menekankan pada pemahaman konteks sosial budaya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila disebut dengan pendekatan apa?

- A. Pendekatan Saintifik
- B. Pendekatan Normatif
- C. Pendekatan Yuridis
- D. Pendekatan Sosiokultural

Pembahasan: Jawaban D. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konteks sosial budaya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui metode seperti observasi lapangan, proyek sosial, dan diskusi kelompok.

1.6 Evaluasi Pendidikan Pancasila

Evaluasi Pendidikan Pancasila (PPKn) merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik dalam memahami, mengamalkan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Tujuan evaluasi PPKn adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila.

2. Mengukur kemampuan peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menilai sikap peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila.
4. Memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang perkembangan belajarnya.
5. Memperbaiki proses pembelajaran PPKn.

Terdapat beberapa jenis evaluasi PPKn, antara lain:

1. Evaluasi Formatif: Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran.
2. Evaluasi Sumatif: Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan.
3. Evaluasi Diagnostik: Evaluasi diagnostik dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik. Hasil evaluasi diagnostik dapat digunakan untuk memperbaiki program pembelajaran dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan dalam PPKn, antara lain:

1. Tes: Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, atau tes praktik.
2. Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penilaian Sikap: Penilaian sikap dilakukan untuk menilai sikap peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila.
4. Penilaian Portofolio: Penilaian portofolio dilakukan untuk menilai hasil karya peserta didik yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi PPKn sangat penting karena:

1. Membantu guru dalam mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik.

2. Memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang perkembangan belajarnya.
3. Memperbaiki proses pembelajaran PPKn.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn.

Evaluasi

1. Manakah tujuan utama evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila?
 - A. Mengukur kemampuan kognitif siswa dalam memahami konsep Pancasila.
 - B. Mengembangkan karakter dan budi pekerti luhur siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
 - C. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan patriotisme siswa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila.
 - D. Semua jawaban benar.

Pembahasan: Jawaban D. Evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila memiliki tujuan yang multidimensi, yaitu untuk:

1. Mengukur kemampuan kognitif siswa dalam memahami konsep Pancasila.
 2. Mengembangkan karakter dan budi pekerti luhur siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
 3. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan patriotisme siswa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila.
 4. Memperkuat pemahaman siswa tentang konteks sosial budaya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila.
-
2. Berikut ini yang termasuk teknik evaluasi formatif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila adalah:
 - A. Tes tertulis akhir semester
 - B. Observasi perilaku siswa di kelas
 - C. Penilaian proyek kelompok
 - D. Observasi dan penilaian diri

Pembahasan: Jawaban B. Teknik evaluasi formatif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan secara berkelanjutan

selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar siswa. Observasi perilaku siswa di kelas memungkinkan guru untuk menilai secara langsung bagaimana siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka.

3. Manakah instrumen yang tepat untuk menilai pengetahuan siswa tentang konsep Pancasila?

- A. Lembar observasi
- B. Rubrik penilaian
- C. Tes tertulis
- D. Kuesioner

Pembahasan: Jawaban C. Tes tertulis dengan format pilihan ganda, esai, atau uraian dapat digunakan untuk menilai pengetahuan siswa tentang konsep dan teori Pancasila. Tes tertulis harus dirancang dengan baik untuk mengukur pemahaman siswa secara mendalam dan komprehensif.

4. Berikut ini yang termasuk aspek penilaian dalam evaluasi sikap dan karakter siswa dalam Pendidikan Pancasila adalah:

- A. Kemampuan menjawab soal-soal Pancasila
- B. Partisipasi pasif dalam diskusi kelas
- C. Kesopanan dan rasa hormat kepada guru dan teman
- D. B dan C

Pembahasan: Jawaban C. Evaluasi sikap dan karakter siswa dalam Pendidikan Pancasila berfokus pada penilaian bagaimana siswa berperilaku dan menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif dalam diskusi kelas, kesopanan dan rasa hormat kepada guru dan teman, serta kepedulian terhadap orang lain merupakan indikator penting dari internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa.

5. Ujian nasional (UN) merupakan salah satu bentuk evaluasi eksternal dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Manakah yang paling tepat untuk mendeskripsikan karakteristik UN dalam konteks Pendidikan Pancasila?

- A. UN mengukur tingkat penguasaan materi secara menyeluruh.
- B. UN menekankan pada penilaian hafalan dan pemahaman konsep.
- C. UN dapat berupa tes tertulis, proyek, atau portofolio.
- D. UN dirancang untuk menilai internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan: Jawaban A. UN mengukur tingkat penguasaan materi secara menyeluruh. UN dalam Pendidikan Pancasila dirancang untuk mengukur pencapaian belajar siswa secara nasional, termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. UN harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

6. Di tengah gejolak global dan perkembangan teknologi yang pesat, nilai-nilai Pancasila dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan paling signifikan yang dihadapi Pancasila saat ini adalah:
- A. Munculnya radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan bangsa.
 - B. Lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan maraknya korupsi dan ketidakadilan.
 - C. Krisis ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan kemiskinan yang meluas.
 - D. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan: Jawaban A. Walaupun semua pilihan jawaban merupakan tantangan bagi Pancasila, pilihan A adalah yang paling signifikan karena dapat langsung membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Radikalisme dan intoleransi dapat memicu konflik dan kekerasan antar kelompok, sehingga menggerus fondasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan.

7. Dalam mewujudkan demokrasi Pancasila, peran serta masyarakat sangatlah penting. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila adalah:
- A. Melakukan demonstrasi di jalan untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut perubahan.
 - B. Mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka tanpa mempertimbangkan dampaknya.
 - C. Membentuk kelompok-kelompok eksklusif berdasarkan suku, agama, atau ras tertentu.
 - D. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan mengawasi kinerja pemerintah secara konstruktif.

Pembahasan: Jawaban D. Pilihan D adalah bentuk partisipasi masyarakat yang paling mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat, gotong royong, dan keadilan sosial. Demonstrasi (pilihan A) dan kritik terbuka tanpa pertimbangan (pilihan B) dapat memicu ketegangan dan mengganggu stabilitas. Pembentukan kelompok eksklusif (pilihan C) bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

8. Dalam penerapan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Manakah indikator berikut yang paling tepat?
- A. Melakukan ritual keagamaan secara rutin tanpa memahami maknanya.
 - B. Memamerkan ketaatan beragama dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - C. Menghargai perbedaan keyakinan dan menghormati hak orang lain untuk beribadah.
 - D. Memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain dan mendiskriminasi mereka yang berbeda keyakinan.

Pembahasan: Jawaban C. Pilihan C adalah indikator yang paling tepat karena mencerminkan toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pilihan A

menunjukkan ritualitas tanpa makna, pilihan B menunjukkan keinginan untuk diakui, dan pilihan D menunjukkan sikap intoleran dan diskriminatif.

9. Pada era globalisasi, budaya asing dengan mudah masuk dan memengaruhi budaya lokal. Dalam menyikapi hal ini, sikap yang tepat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah:
- A. Menolak semua budaya asing karena dianggap bertentangan dengan budaya lokal.
 - B. Menerima semua budaya asing tanpa filter dan mengadopsi gaya hidup yang serba asing.
 - C. Memilih budaya asing yang dianggap modern dan canggih, dan meninggalkan budaya lokal yang dianggap ketinggalan zaman.
 - D. Membuka diri terhadap budaya asing, namun tetap menjaga dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas bangsa.

Pembahasan: Jawaban D. Pilihan D adalah sikap yang tepat karena mencerminkan sikap terbuka dan toleran terhadap budaya asing, namun tetap menjunjung tinggi budaya lokal sebagai identitas bangsa. Pilihan A dan B menunjukkan sikap yang ekstrem dan tidak bijaksana, sedangkan pilihan C mengarah pada hilangnya identitas budaya bangsa.

10. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada peran serta negara. Salah satu peran penting negara dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila adalah:
- A. Membiarkan masyarakat untuk menyelesaikan konflik antar kelompok secara mandiri tanpa intervensi.
 - B. Melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.
 - C. Menerapkan sistem hukum yang represif untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat.

D. Menyelenggarakan pendidikan Pancasila secara berkelanjutan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada generasi muda.

Pembahasan: Jawaban D. Pilihan D adalah peran penting negara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila karena pendidikan Pancasila dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan toleransi, serta membekali generasi muda dengan pemahaman yang komprehensif tentang Pancasila. Pilihan A, B, dan C bertentangan dengan nilai



BAB 2

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

3.1 Tujuan Pembelajaran

Bab landasan pendidikan pancasila ini terdiri dari 7 subbab materi diantaranya landasan historis, landasan kulturan, landasan yuridis, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan landasan pedagogis . Masing-masing subbab tersebut memiliki tujuan pembelajaran diantara:

1. Landasan Historis
 - a. Memahami konteks sejarah bangsa Indonesia yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila.
 - b. Mengetahui nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.
 - c. Menjelaskan peran Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
 - d. Menganalisis keterkaitan Pancasila dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
 - e. Menghargai perjuangan para pahlawan bangsa dalam merumuskan dan memperjuangkan Pancasila.
2. Landasan Kulturan
 - a. Memahami nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang menjadi dasar perumusan Pancasila.
 - b. Mengetahui keragaman budaya bangsa Indonesia yang dipersatukan oleh Pancasila.
 - c. Menjelaskan peran Pancasila dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia.
 - d. Menganalisis hubungan antara Pancasila dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.
 - e. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
3. Landasan Yuridis

- a. Memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia.
 - b. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara.
 - c. Menjelaskan peran Pancasila dalam sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia.
 - d. Menganalisis hubungan antara Pancasila dengan konstitusi dan hukum positif di Indonesia.
 - e. Menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlandaskan Pancasila.
4. Landasan Filosofis
- a. Memahami hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
 - b. Mengetahui nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.
 - c. Menjelaskan hubungan antara Pancasila dengan berbagai aliran pemikiran filosofis.
 - d. Menganalisis makna dan implikasi filosofis Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e. Mengembangkan pemikiran kritis dan rasional yang berlandaskan nilai-nilai filosofis Pancasila.
5. Landasan Sosiologis
- a. Memahami realitas sosial masyarakat Indonesia yang menjadi dasar perumusan Pancasila.
 - b. Mengetahui nilai-nilai sosiologis yang terkandung dalam Pancasila.
 - c. Menjelaskan peran Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
 - d. Menganalisis hubungan antara Pancasila dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
 - e. Mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila.

6. Landasan Psikologis

- a. Memahami hakikat manusia dan kebutuhan psikologisnya yang menjadi dasar perumusan Pancasila.
- b. Mengetahui nilai-nilai psikologis yang terkandung dalam Pancasila.
- c. Menjelaskan peran Pancasila dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan bermartabat.
- d. Menganalisis hubungan antara Pancasila dengan perkembangan kepribadian dan jiwa manusia.
- e. Mengembangkan potensi diri dan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai psikologis Pancasila.

7. Landasan Pedagogis

- a. Memahami prinsip-prinsip pendidikan yang berlandaskan Pancasila.
- b. Mengetahui strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.
- c. Menjelaskan peran pendidik dalam mewujudkan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila.
- d. Menganalisis hubungan antara Pancasila dengan kurikulum dan sistem pendidikan nasional.
- e. Mengembangkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap Pancasila.

3.2 Landasan Historis

Landasan historis Pendidikan Pancasila merupakan pemahaman tentang nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, serta peran Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Memahami landasan historis ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Pancasila, serta memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila dirumuskan dengan mengambil nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Nilai Ketuhanan: Keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nilai Kemanusiaan: Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang setara.
3. Nilai Persatuan: Rasa cinta tanah air dan semangat untuk bersatu padu.
4. Nilai Kerakyatan: Kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat.
5. Nilai Keadilan: Penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pancasila telah memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Berikut beberapa contoh peran Pancasila:

1. Sebagai Dasar Perumusan Kemerdekaan: Pancasila menjadi dasar bagi para pendiri bangsa untuk merumuskan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
2. Sebagai Pemersatu Bangsa: Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, dengan berbagai suku, agama, dan budaya.
3. Sebagai Pedoman Hidup Bangsa: Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Sebagai Landasan Pembangunan Nasional: Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Memahami landasan historis Pendidikan Pancasila memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

1. Meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap Pancasila.
2. Memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memahami makna dan tujuan Pendidikan Pancasila.

4. Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme.
5. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Evaluasi

1. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh siapa?
 - A. Soekarno
 - B. Moh. Hatta
 - C. Soepomo
 - D. Moh. Yamin

Pembahasan: Jawaban A. Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal di depan sidang BPUPKI yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan lima dasar negara yang kemudian diterima sebagai Pancasila.

2. BPUPKI dibentuk pada tahun berapa?
 - A. 1942
 - B. 1944
 - C. 1945
 - D. 1946

Pembahasan: Jawaban C. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menyusun dasar negara.

3. Apa tujuan utama dari BPUPKI?
 - A. Menyusun anggaran negara
 - B. Menyusun dasar negara
 - C. Mengatur perdagangan
 - D. Membangun infrastruktur

Pembahasan: Jawaban B. Tujuan utama BPUPKI adalah menyusun dasar negara untuk Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang-

sidangnya, BPUPKI membahas berbagai hal penting terkait pembentukan negara, termasuk dasar negara yang akhirnya dirumuskan dalam Pancasila.

4. Siapa yang mengusulkan nama "Pancasila"?

- A. Moh. Hatta
- B. Soepomo
- C. Soekarno
- D. Ahmad Subardjo

Pembahasan: Jawaban C. Nama "Pancasila" diusulkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengambil istilah tersebut dari bahasa Sanskerta yang berarti lima prinsip atau asas yang menjadi dasar negara Indonesia.

5. Pada tanggal berapa Pancasila disahkan sebagai dasar negara?

- A. 17 Agustus 1945
- B. 18 Agustus 1945
- C. 1 Juni 1945
- D. 29 Mei 1945

Pembahasan: Jawaban B. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pengesahan ini terjadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

6. Di mana Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno?

- A. Jakarta
- B. Yogyakarta
- C. Surabaya
- D. Bandung

Pembahasan: Jawaban A. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato tersebut disampaikan di depan sidang BPUPKI yang berlangsung di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila).

7. Siapa yang memimpin sidang pertama BPUPKI?

- A. Soekarno
- B. Radjiman Wedyodiningrat
- C. Moh. Hatta
- D. Ahmad Subardjo

Pembahasan: Jawaban B. Sidang pertama BPUPKI dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Beliau adalah ketua BPUPKI dan memimpin jalannya sidang yang membahas berbagai aspek penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia.

8. Apakah isi dari sila pertama Pancasila?

- A. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- B. Persatuan Indonesia
- C. Ketuhanan Yang Maha Esa
- D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembahasan: Jawaban C. Isi dari sila pertama Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ini menekankan pentingnya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai dasar moral dan spiritual bangsa Indonesia.

9. Bagaimana peran PPKI dalam sejarah Pancasila?

- A. Menyusun proklamasi kemerdekaan
- B. Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara
- C. Mengatur ekonomi negara
- D. Mendirikan lembaga pendidikan

Pembahasan: Jawaban B. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) berperan dalam mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden serta wakil presiden pertama Republik Indonesia.

10. Siapakah anggota BPUPKI yang juga berperan dalam penyusunan Pancasila?

- A. Ki Hadjar Dewantara
- B. Moh. Yamin
- C. Djuanda Kartawidjaja

D. Sutan Sjahrir

Pembahasan: Jawaban B. Moh. Yamin adalah salah satu anggota BPUPKI yang berperan dalam penyusunan Pancasila. Ia menyampaikan lima asas dasar yang kemudian menjadi bagian dari perdebatan dan pembahasan dalam sidang BPUPKI sebelum akhirnya disepakati sebagai Pancasila.

3.3 Landasan Kultural

Landasan Kultural Pendidikan Pancasila merupakan pemahaman tentang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang menjadi dasar perumusan Pancasila. Memahami landasan kultural ini penting untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa Indonesia, serta memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dirumuskan dengan mengambil nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Nilai Ketuhanan: Keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam berbagai ritual dan tradisi keagamaan.
2. Nilai Kemanusiaan: Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang setara yang tercermin dalam nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, dan saling menghormati.
3. Nilai Persatuan: Rasa cinta tanah air dan semangat untuk bersatu padu yang tercermin dalam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan semangat persatuan dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya.
4. Nilai Kerakyatan: Kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat yang tercermin dalam nilai-nilai demokrasi dan tradisi musyawarah dalam pengambilan keputusan.
5. Nilai Keadilan: Penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera yang tercermin dalam nilai-nilai keseimbangan, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan.

Contoh Penerapan Nilai-nilai Budaya Bangsa Indonesia dalam Pancasila

1. Nilai Ketuhanan: Sila Pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.
2. Nilai Kemanusiaan: Sila Kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mewajibkan setiap warga negara untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
3. Nilai Persatuan: Sila Ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia" mewajibkan setiap warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang dianut oleh bangsa Indonesia.
4. Nilai Kerakyatan: Sila Keempat Pancasila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" mewajibkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.
5. Nilai Keadilan: Sila Kelima Pancasila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mewajibkan setiap warga negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Memahami landasan kultural Pendidikan Pancasila memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

1. Meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa Indonesia.
2. Memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Memahami makna dan tujuan Pendidikan Pancasila.
4. Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme.
5. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan landasan kultural dalam konteks Pendidikan Pancasila?
 - A. Nilai-nilai budaya lokal yang mendukung Pancasila
 - B. Pengajaran mata pelajaran sejarah
 - C. Penggunaan teknologi dalam pendidikan
 - D. Sistem ekonomi tradisional

Pembahasan: Jawaban A. Landasan kultural dalam konteks Pendidikan Pancasila mengacu pada nilai-nilai budaya lokal yang mendukung dan memperkuat Pancasila. Budaya lokal yang kaya dan beragam di Indonesia memberikan fondasi kuat bagi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mengapa budaya lokal penting dalam pendidikan Pancasila?
 - A. Membuat siswa lebih pintar
 - B. Meningkatkan ekonomi negara
 - C. Mengajarkan toleransi dan keragaman
 - D. Mempercepat pembangunan infrastruktur

Pembahasan: Jawaban C. Budaya lokal penting dalam pendidikan Pancasila karena mengajarkan toleransi dan keragaman. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, dan melalui pengenalan budaya lokal, siswa belajar menghargai perbedaan serta memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai Pancasila.

3. Salah satu contoh nilai budaya yang sejalan dengan sila pertama Pancasila adalah?
 - A. Gotong royong
 - B. Tenggang rasa
 - C. Musyawarah
 - D. Kepercayaan terhadap Tuhan

Pembahasan: Jawaban D. Kepercayaan terhadap Tuhan adalah contoh nilai budaya yang sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Banyak budaya lokal di Indonesia yang memiliki tradisi spiritual dan keagamaan yang kuat, mencerminkan penghormatan kepada Tuhan.

4. Bagaimana nilai gotong royong terkait dengan Pendidikan Pancasila?

- A. Menumbuhkan semangat individualisme
- B. Mengajarkan siswa bersaing
- C. Memperkuat rasa kebersamaan dan saling membantu
- D. Mendorong siswa untuk bekerja sendiri

Pembahasan: Jawaban C. Nilai gotong royong terkait dengan Pendidikan Pancasila karena memperkuat rasa kebersamaan dan saling membantu. Gotong royong merupakan salah satu nilai budaya yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia, dan ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia".

5. Apa yang dimaksud dengan musyawarah dalam konteks budaya Indonesia?

- A. Keputusan diambil oleh satu orang
- B. Pembicaraan bersama untuk mencapai mufakat
- C. Menunda keputusan
- D. Pemilihan pemimpin secara acak

Pembahasan: Jawaban B. Musyawarah dalam konteks budaya Indonesia adalah pembicaraan bersama untuk mencapai mufakat. Nilai ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", yang mengutamakan proses pengambilan keputusan secara kolektif dan demokratis.

6. Apa contoh implementasi nilai budaya dalam pendidikan Pancasila di sekolah?

- A. Pengenalan teknologi informasi
- B. Pelajaran bahasa asing

- C. Penghormatan upacara adat
- D. Olahraga modern

Pembahasan: Jawaban C. Contoh implementasi nilai budaya dalam pendidikan Pancasila di sekolah adalah penghormatan upacara adat. Dengan menghormati dan memperkenalkan upacara adat, sekolah membantu siswa memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

7. Apa hubungan antara budaya lokal dan identitas nasional?
- A. Budaya lokal tidak relevan
 - B. Budaya lokal membentuk identitas nasional
 - C. Identitas nasional menggantikan budaya lokal
 - D. Budaya lokal melemahkan identitas nasional

Pembahasan: Jawaban B. Budaya lokal membentuk identitas nasional. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki identitas nasional yang terbentuk dari beragam budaya lokal. Ini memperkuat rasa kebanggaan dan kesatuan sebagai bangsa yang majemuk.

8. Bagaimana Pendidikan Pancasila dapat membantu pelestarian budaya lokal?
- A. Mengabaikan tradisi
 - B. Menghapus budaya asing
 - C. Mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam kurikulum
 - D. Memperkenalkan budaya asing

Pembahasan: Jawaban C. Pendidikan Pancasila dapat membantu pelestarian budaya lokal dengan mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam kurikulum. Melalui pengajaran dan kegiatan yang berlandaskan budaya lokal, siswa dapat lebih memahami, menghargai, dan melestarikan budaya mereka.

9. Apa contoh nilai budaya yang mencerminkan sila kedua Pancasila?
- A. Ketuhanan
 - B. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- C. Persatuan
- D. Demokrasi

Pembahasan: Jawaban B. Nilai budaya yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Misalnya, budaya tenggang rasa yang mengajarkan untuk saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan adil dan bermartabat.

10. Mengapa pengenalan budaya lokal penting dalam membentuk karakter siswa?
- A. Mengajarkan teknologi terbaru
 - B. Meningkatkan kemampuan bahasa asing
 - C. Memperkuat nilai-nilai moral dan sosial
 - D. Mengurangi interaksi sosial

Pembahasan: Jawaban C. Pengenalan budaya lokal penting dalam membentuk karakter siswa karena memperkuat nilai-nilai moral dan sosial. Melalui pemahaman budaya lokal, siswa belajar tentang nilai-nilai seperti kerjasama, hormat-menghormati, dan kebersamaan yang esensial untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Pancasila.

3.4 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Pendidikan Pancasila. Memahami landasan yuridis ini penting untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum Pendidikan Pancasila, serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UUD 1945: Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.
2. Ketetapan MPR: Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1988 tentang Pancasila sebagai Etika Politik dan Etika Pembangunan.

3. Undang-undang: Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Isi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan di atas, Pendidikan Pancasila memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang kuat, yaitu:

1. Wajib: Pendidikan Pancasila wajib dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT).
2. Berlaku: Pendidikan Pancasila berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.
3. Mengikat: Pendidikan Pancasila mengikat seluruh warga negara Indonesia, baik penyelenggara pendidikan, pendidik, maupun peserta didik.

Penerapan landasan yuridis Pendidikan Pancasila bertujuan untuk:

1. Memastikan pelaksanaan Pendidikan Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas Pendidikan Pancasila.
3. Melindungi hak peserta didik untuk mendapatkan Pendidikan Pancasila yang berkualitas.
4. Memperkuat komitmen bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Evaluasi

1. Apa dasar hukum yang mengatur Pendidikan Pancasila di Indonesia?
 - A. Undang-Undang Dasar 1945
 - B. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

C. Keputusan Presiden

D. Instruksi Presiden

Pembahasan: Jawaban A. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pendidikan. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari upaya tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mendukung landasan hukum Pendidikan Pancasila. UU ini menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang.

2. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia?

A. Presiden

B. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

C. Gubernur

D. Bupati

Pembahasan: Jawaban B. Tanggung jawab utama atas pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Indonesia berada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian ini bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, pedoman, dan standar pendidikan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Mereka juga mengawasi implementasi kebijakan tersebut di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada tingkat pusat. Pemerintah daerah, termasuk gubernur dan bupati, juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa

kebijakan dan program pendidikan yang berlandaskan Pancasila diterapkan dengan baik di wilayah masing-masing. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

3. Apa saja yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait Pendidikan Pancasila?

- A. Mata pelajaran wajib
- B. Struktur kurikulum
- C. Pengembangan karakter siswa
- D. Semua benar

Pembahasan: Jawaban D. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur beberapa aspek penting terkait Pendidikan Pancasila. Pertama, undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar pendidikan nasional. Ini berarti bahwa seluruh aktivitas pendidikan di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kedua, UU ini mengatur bahwa Pendidikan Pancasila harus menjadi bagian dari kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Ini mencakup pengajaran tentang Pancasila sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Selain itu, pengembangan karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila juga ditekankan, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila.

4. Bagaimana peran Peraturan Pemerintah dalam implementasi Pendidikan Pancasila?

- A. Sebagai pelengkap undang-undang
- B. Mengatur teknis pelaksanaan
- C. Menentukan kurikulum nasional
- D. Memberikan anggaran pendidikan

Pembahasan: Jawaban B. Peran Peraturan Pemerintah (PP) dalam implementasi Pendidikan Pancasila adalah mengatur teknis

pelaksanaan. PP berfungsi untuk menjabarkan lebih rinci ketentuan yang ada dalam undang-undang, termasuk dalam hal pendidikan. Misalnya, PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur standar-standar yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk materi Pendidikan Pancasila. Dengan adanya PP, pemerintah dapat memastikan bahwa pendidikan Pancasila diajarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencakup aspek kurikulum, metode pengajaran, hingga evaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dapat tercapai dengan efektif dan efisien. PP juga membantu memberikan panduan operasional yang lebih jelas bagi institusi pendidikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

5. Apa peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pendidikan Pancasila?
- A. Menyusun kurikulum
 - B. Menguji undang-undang
 - C. Mengawasi pelaksanaan pendidikan
 - D. Memberikan sanksi kepada sekolah

Pembahasan: Jawaban B. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menguji undang-undang yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila. Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review*, yaitu menguji kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945. Jika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau mengubah undang-undang tersebut. Peran ini penting untuk memastikan bahwa seluruh undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk Pendidikan Pancasila, sejalan dengan nilai-nilai dasar negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi membantu menjaga integritas hukum dan memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tetap berlandaskan Pancasila. Hal ini

memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi negara.

6. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bagaimana peran Pendidikan Pancasila?

- A. Mata kuliah wajib di semua program studi
- B. Pilihan mata kuliah
- C. Hanya untuk program studi tertentu
- D. Tidak diatur

Pembahasan: Jawaban A. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Pancasila ditetapkan sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa di berbagai program studi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lulusan perguruan tinggi memiliki pemahaman dan penghayatan yang baik terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan menjadikan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib, pemerintah berharap para lulusan dapat menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan profesional dan sosial. Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi juga diharapkan dapat membentuk karakter lulusan yang berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, dan mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa.

7. Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Pendidikan Pancasila?

- A. Materi ajar
- B. Metode pengajaran
- C. Evaluasi pembelajaran
- D. Semua benar

Pembahasan: Jawaban D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur beberapa aspek penting terkait

Pendidikan Pancasila. Pertama, peraturan ini menetapkan materi ajar yang harus mencakup nilai-nilai Pancasila di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Pancasila sejak dini. Kedua, peraturan ini juga mengatur metode pengajaran yang harus digunakan dalam menyampaikan materi Pendidikan Pancasila. Metode ini harus interaktif dan partisipatif, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terakhir, peraturan ini menetapkan evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh siswa. Dengan demikian, peraturan ini memberikan panduan komprehensif bagi sekolah dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila secara efektif.

8. Bagaimana pengaturan kurikulum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020?
- A. Mata kuliah pilihan
 - B. Mata kuliah wajib
 - C. Tidak wajib
 - D. Sesuai kebijakan universitas

Pembahasan: Jawaban B. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur bahwa Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Setiap mahasiswa diharuskan untuk mengambil dan lulus mata kuliah ini sebagai bagian dari kurikulum mereka. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Dengan menjadikan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib, diharapkan mahasiswa dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar negara dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

9. Apa landasan yuridis utama dari Pendidikan Pancasila di Indonesia?

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- B. Undang-Undang Dasar 1945
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- D. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pendidikan Pancasila

Pembahasan: Jawaban A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah landasan yuridis utama bagi Pendidikan Pancasila di Indonesia. Dalam undang-undang ini, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila diatur dalam berbagai jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan pentingnya pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila, diharapkan peserta didik mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk generasi yang cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

- 10. Manakah yang menjadi landasan konstitusional bagi Pendidikan Pancasila?
 - A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

D. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pendidikan Moral Pancasila

Pembahasan: Jawaban C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi Pendidikan Pancasila di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang meliputi lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filosofis dan ideologis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi panduan bagi segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh peserta didik. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 tidak hanya menjadi landasan yuridis tetapi juga landasan moral dan ideologis bagi pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia. Melalui pendidikan Pancasila, diharapkan terbentuk warga negara yang berkarakter, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3.5 Landasan Filosofis

Landasan filosofis Pendidikan Pancasila merupakan pemahaman tentang hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Memahami landasan filosofis ini penting untuk mengetahui makna dan tujuan Pendidikan Pancasila, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara berlandaskan filosofis yang kuat. Pancasila bukan hanya sekumpulan kata-kata, tetapi merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki beberapa ciri, antara lain:

1. Menyeluruh: Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.
2. Universal: Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan sesuai dengan kodrat manusia serta nilai-nilai luhur bangsa lain.
3. Fundamental: Pancasila merupakan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
4. Terbuka: Pancasila bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk:

1. Membentuk manusia Indonesia yang berpancasila: Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Pancasila, serta memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengembangkan kepribadian bangsa: Pendidikan Pancasila diharapkan dapat membantu mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, bermartabat, dan berjiwa Pancasila.
3. Mempersiapkan generasi muda: Pendidikan Pancasila diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila dan mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pancasila memiliki lima nilai filosofis yang fundamental, yaitu:

1. Nilai Ketuhanan: Menyadarkan manusia tentang hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mendorong manusia untuk hidup bermoral dan berakhlak mulia.
2. Nilai Kemanusiaan: Mengakui dan menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia yang setara.
3. Nilai Persatuan: Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk bersatu padu demi mencapai cita-cita bersama.

4. Nilai Kerakyatan: Mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Nilai Keadilan: Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan hukum dan keadilan sosial.

Nilai-nilai filosofis Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara, antara lain:

1. Menjalankan ibadah dan berakhlak mulia: Sebagai wujud pengamalan nilai Ketuhanan.
2. Saling menghormati dan menghargai perbedaan: Sebagai wujud pengamalan nilai Kemanusiaan.
3. Mengikuti kegiatan gotong royong dan musyawarah mufakat: Sebagai wujud pengamalan nilai Persatuan dan Kerakyatan.
4. Mematuhi hukum dan norma yang berlaku: Sebagai wujud pengamalan nilai Keadilan.

Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam konteks Pendidikan Pancasila?
 - A. Aspek hukum yang mendasari pendidikan
 - B. Aspek teknis pelaksanaan pendidikan
 - C. Nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi pendidikan
 - D. Sistem administrasi pendidikan

Pembahasan: Jawaban C. Landasan filosofis dalam konteks Pendidikan Pancasila mengacu pada nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dari pendidikan itu sendiri. Filosofi pendidikan Pancasila berakar pada nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini membentuk kerangka berpikir dan bertindak dalam proses pendidikan di Indonesia. Pendekatan filosofis ini menekankan pentingnya pembentukan karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk transfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk individu yang

berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan landasan filosofis yang kuat, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan generasi yang mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagaimana Pancasila sebagai dasar filosofis mempengaruhi tujuan pendidikan nasional?

- A. Membentuk siswa yang cerdas secara akademis
- B. Mengembangkan kemampuan intelektual saja
- C. Membentuk siswa yang berkarakter Pancasila
- D. Mengutamakan prestasi akademik di atas segalanya

Pembahasan: Jawaban C. Pancasila sebagai dasar filosofis mempengaruhi tujuan pendidikan nasional dengan menekankan pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila memberikan panduan nilai-nilai moral dan etika yang harus diinternalisasi oleh setiap individu. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik, yang mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara, serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Apa peran nilai ketuhanan dalam landasan filosofis Pendidikan Pancasila?

- A. Mengajarkan toleransi beragama
- B. Mengajarkan teknologi terbaru
- C. Meningkatkan kecerdasan akademis
- D. Mengajarkan keterampilan teknis

Pembahasan: Jawaban A. Nilai ketuhanan dalam landasan filosofis Pendidikan Pancasila berperan penting dalam mengajarkan toleransi beragama. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama. Dalam konteks pendidikan, nilai ini diterapkan dengan mengajarkan siswa untuk menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Melalui Pendidikan Pancasila, siswa diajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, serta mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghindari konflik yang berbasis pada perbedaan agama. Dengan demikian, nilai ketuhanan tidak hanya mengembangkan aspek spiritual siswa, tetapi juga membentuk karakter yang inklusif dan toleran.

4. Mengapa sila kedua Pancasila penting dalam pendidikan?

- A. Mengajarkan keterampilan teknis
- B. Meningkatkan kemampuan intelektual
- C. Membangun kemanusiaan yang adil dan beradab
- D. Mengutamakan prestasi akademik

Pembahasan: Jawaban C. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", penting dalam pendidikan karena menekankan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan harus mampu membentuk individu yang memiliki rasa kemanusiaan, adil, dan bermoral. Nilai ini mendorong pengembangan sikap saling menghormati, toleransi, dan empati terhadap sesama. Dalam proses pendidikan, pengajaran nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti diskusi, studi kasus, dan kegiatan sosial. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang pentingnya keadilan dan kesopanan, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan akan menghasilkan individu yang mampu

berinteraksi dengan baik dalam masyarakat dan berkontribusi positif dalam membangun bangsa yang bermartabat.

5. Apa dampak nilai persatuan dalam pendidikan?

- A. Mengutamakan individualisme
- B. Membentuk kerjasama dan gotong royong
- C. Mengajarkan kompetisi yang ketat
- D. Meningkatkan prestasi akademik

Pembahasan: Jawaban B. Nilai persatuan dalam pendidikan berperan penting dalam membentuk sikap kerjasama dan gotong royong di kalangan siswa. Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks pendidikan, nilai ini diterapkan dengan mengajarkan siswa untuk bekerja sama, saling membantu, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kegiatan-kegiatan seperti proyek kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan kerja bakti di sekolah adalah beberapa contoh bagaimana nilai persatuan dapat diterapkan dalam pendidikan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, siswa belajar tentang pentingnya kolaborasi, saling menghargai, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, nilai persatuan membantu membentuk karakter siswa yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat dan memelihara keharmonisan sosial.

6. Bagaimana Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai kerakyatan?

- A. Melalui pelajaran matematika
- B. Melalui diskusi dan musyawarah
- C. Melalui pelajaran olahraga
- D. Melalui ujian tertulis

Pembahasan: Jawaban B. Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai kerakyatan melalui metode diskusi dan musyawarah. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menekankan pentingnya demokrasi dan pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks

pendidikan, nilai ini diterapkan dengan mendorong siswa untuk berdiskusi, berdebat, dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Melalui kegiatan diskusi dan musyawarah, siswa belajar tentang pentingnya mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan mencari solusi yang adil dan bijaksana. Ini tidak hanya membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi, tetapi juga membentuk sikap demokratis dan partisipatif. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila membantu mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

7. Apa peran nilai keadilan sosial dalam pendidikan?

- A. Menekankan persaingan ketat
- B. Mengajarkan distribusi kesejahteraan yang adil
- C. Meningkatkan kecerdasan akademis
- D. Mengutamakan teknologi modern

Pembahasan: Jawaban B. Nilai keadilan sosial dalam pendidikan berperan penting dalam mengajarkan distribusi kesejahteraan yang adil. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan, nilai ini diterapkan dengan mengajarkan siswa tentang pentingnya berbagi, kepedulian sosial, dan kesetaraan. Melalui kegiatan seperti bakti sosial, proyek komunitas, dan diskusi tentang isu-isu sosial, siswa belajar untuk peka terhadap ketidakadilan dan memahami pentingnya memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Pendidikan yang berlandaskan nilai keadilan sosial juga berusaha mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan demikian, nilai keadilan sosial membantu membentuk generasi yang peduli dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

8. Bagaimana Pancasila sebagai landasan filosofis mempengaruhi metode pengajaran di sekolah?

- A. Mendorong penggunaan teknologi modern
- B. Mengutamakan hafalan dan ulangan
- C. Mendorong metode pengajaran yang partisipatif
- D. Mengajarkan keterampilan teknis

Pembahasan: Jawaban C. Pancasila sebagai landasan filosofis mempengaruhi metode pengajaran di sekolah dengan mendorong metode pengajaran yang partisipatif. Pendidikan Pancasila menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi musyawarah sangat dianjurkan karena mereka melibatkan siswa secara langsung dan membantu mereka memahami serta menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Metode pengajaran partisipatif memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Selain itu, metode ini juga membantu siswa untuk belajar menghargai pendapat orang lain, berempati, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman akademis siswa, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

9. Mengapa penting bagi guru untuk memahami landasan filosofis Pendidikan Pancasila?

- A. Agar dapat mengajar dengan lebih santai
- B. Agar dapat mengajarkan keterampilan teknis
- C. Agar dapat membentuk karakter siswa sesuai nilai Pancasila
- D. Agar dapat meningkatkan nilai ujian siswa

Pembahasan: Jawaban C. Penting bagi guru untuk memahami landasan filosofis Pendidikan Pancasila agar dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Guru yang memahami dan menghayati landasan filosofis ini akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran secara efektif. Mereka dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya

nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selain itu, pemahaman mendalam tentang landasan filosofis Pendidikan Pancasila memungkinkan guru untuk menjadi teladan yang baik bagi siswa. Guru dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat belajar dari contoh nyata. Dengan demikian, pemahaman guru tentang landasan filosofis ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan membentuk generasi yang berkarakter Pancasila.

10. Bagaimana landasan filosofis Pendidikan Pancasila membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari?
 - A. Mengajarkan cara menggunakan teknologi
 - B. Membantu siswa memahami mata pelajaran akademis
 - C. Membentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan Pancasila
 - D. Meningkatkan keterampilan teknis

Pembahasan: Jawaban C. Landasan filosofis Pendidikan Pancasila membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan membentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi pedoman bagi siswa dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengambil keputusan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan rasa kebangsaan yang tinggi. Dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik, yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Mereka akan memiliki rasa toleransi, empati, dan keadilan yang kuat, sehingga dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Sikap dan perilaku yang berlandaskan Pancasila juga akan membantu siswa dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam kehidupan, serta menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab.

3.6 Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis Pendidikan Pancasila merupakan pemahaman tentang realitas sosial masyarakat Indonesia yang menjadi dasar perumusan Pancasila. Memahami landasan sosiologis ini penting untuk mengetahui nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Pancasila, serta mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk di Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan mengambil nilai-nilai sosial yang telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai sosial tersebut antara lain:

1. Nilai Kebersamaan: Gotong royong, musyawarah mufakat, dan solidaritas sosial.
2. Nilai Keadilan Sosial: Rasa keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Nilai Toleransi: Saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.
4. Nilai Kemanusiaan: Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang setara.
5. Nilai Kebebasan: Kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan beragama.

Contoh Penerapan Nilai-nilai Sosial dalam Pancasila, diantaranya:

1. Gotong royong: Melakukan kegiatan bersama untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan bersama.
2. Musyawarah mufakat: Berdiskusi dan mencari kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan.
3. Toleransi: Menghormati tradisi dan budaya suku lain, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
4. Kemanusiaan: Membantu orang lain yang membutuhkan, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
5. Kebebasan: Menyatakan pendapat dan keyakinan dengan bertanggung jawab, tanpa melanggar hak orang lain.

Memahami landasan sosiologis Pendidikan Pancasila memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

1. Meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap nilai-nilai sosial bangsa Indonesia.
2. Memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memahami makna dan tujuan Pendidikan Pancasila.
4. Meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati antar sesama.
5. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan landasan sosiologis dalam konteks Pendidikan Pancasila?
 - A. Aspek hukum yang mendasari pendidikan
 - B. Nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat
 - C. Struktur administrasi pendidikan
 - D. Teknologi yang digunakan dalam pendidikan

Pembahasan: Jawaban B. Landasan sosiologis dalam konteks Pendidikan Pancasila mengacu pada nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat Indonesia dengan segala keanekaragamannya dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan untuk membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan budaya dan norma masyarakat Indonesia. Dengan mempertimbangkan landasan sosiologis, pendidikan diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial yang ada, siswa diharapkan dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat, menghormati perbedaan, dan berkontribusi positif dalam lingkungan sosialnya.

2. Bagaimana landasan sosiologis mempengaruhi tujuan pendidikan Pancasila?

- A. Mengutamakan prestasi akademik
- B. Mengembangkan kemampuan teknis
- C. Membentuk sikap dan perilaku sosial yang baik
- D. Meningkatkan kemampuan intelektual

Pembahasan: Jawaban C. Landasan sosiologis mempengaruhi tujuan pendidikan Pancasila dengan menekankan pembentukan sikap dan perilaku sosial yang baik. Pendidikan Pancasila tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Tujuan ini melibatkan pengembangan sikap saling menghormati, kerjasama, gotong royong, dan rasa tanggung jawab sosial di kalangan siswa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila berfungsi untuk membentuk individu yang mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat, menghargai perbedaan, dan berkontribusi positif dalam komunitasnya. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan kohesif, di mana nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan dapat diwujudkan.

3. Mengapa penting untuk mengajarkan nilai-nilai sosial dalam Pendidikan Pancasila?

- A. Untuk meningkatkan prestasi akademik
- B. Untuk membentuk keterampilan teknis
- C. Untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial
- D. Untuk mempromosikan penggunaan teknologi

Pembahasan: Jawaban C. Penting untuk mengajarkan nilai-nilai sosial dalam Pendidikan Pancasila karena pendidikan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa. Nilai-nilai sosial seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan sangat penting dalam membentuk karakter individu yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Melalui pendidikan, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan, bekerja sama, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Pengajaran nilai-nilai sosial ini juga membantu siswa untuk memahami pentingnya berperan aktif dalam masyarakat dan mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang positif. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya membentuk individu yang berpengetahuan, tetapi juga individu yang memiliki karakter yang kuat dan berkomitmen untuk memajukan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

4. Bagaimana cara landasan sosiologis diterapkan dalam kurikulum Pendidikan Pancasila?

- A. Melalui penekanan pada mata pelajaran eksakta
- B. Melalui integrasi nilai-nilai sosial dalam semua mata pelajaran
- C. Melalui pengajaran keterampilan teknis
- D. Melalui penekanan pada ujian nasional

Pembahasan: Jawaban B. Landasan sosiologis diterapkan dalam kurikulum Pendidikan Pancasila melalui integrasi nilai-nilai sosial dalam semua mata pelajaran. Ini berarti bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan harus diinternalisasikan dalam berbagai aspek pembelajaran, tidak hanya terbatas pada mata pelajaran tertentu. Guru didorong untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks sosial yang relevan dan mengajarkan siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara apa yang mereka pelajari di sekolah dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Dengan cara ini, pendidikan menjadi lebih kontekstual dan relevan, membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya nilai-nilai sosial dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan adil. Ini juga memperkuat komitmen mereka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata.

5. Apa dampak dari tidak menginternalisasi landasan sosiologis dalam Pendidikan Pancasila?

- A. Meningkatnya kemampuan teknis siswa

- B. Menurunnya prestasi akademik
- C. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sosial
- D. Meningkatnya penggunaan teknologi di sekolah

Pembahasan: Jawaban C. Tidak menginternalisasi landasan sosiologis dalam Pendidikan Pancasila dapat berdampak negatif pada kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, siswa mungkin tidak akan mengembangkan sikap saling menghormati, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya individu yang egois dan kurang peka terhadap isu-isu sosial. Selain itu, tanpa landasan sosiologis yang kuat, pendidikan mungkin hanya berfokus pada aspek akademis dan teknis, sehingga mengabaikan pentingnya pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam perkembangan individu, di mana mereka mungkin cerdas secara intelektual tetapi kurang dalam aspek sosial dan emosional. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan landasan sosiologis dalam Pendidikan Pancasila untuk membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berkomitmen untuk memajukan masyarakat.

6. Bagaimana pengajaran Pendidikan Pancasila dapat membantu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat?
- A. Dengan meningkatkan jumlah ujian dan tes
 - B. Dengan mengajarkan nilai-nilai sosial yang relevan
 - C. Dengan mengurangi waktu belajar di sekolah
 - D. Dengan memfokuskan pada pelajaran eksakta

Pembahasan: Jawaban B. Pengajaran Pendidikan Pancasila dapat membantu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai sosial yang relevan kepada siswa. Melalui pendidikan, siswa diajarkan tentang pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini, siswa diharapkan

dapat berkontribusi positif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, dengan menanamkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, siswa dapat menjadi lebih peka terhadap isu-isu seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kemiskinan. Mereka juga dapat diajarkan untuk aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas yang bertujuan untuk membantu orang lain dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila tidak hanya membentuk individu yang berpengetahuan, tetapi juga individu yang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

7. Mengapa penting untuk memahami peran keluarga dalam landasan sosiologis Pendidikan Pancasila?
- A. Karena keluarga adalah sumber utama nilai-nilai sosial
 - B. Karena keluarga menentukan prestasi akademik
 - C. Karena keluarga mengajarkan keterampilan teknis
 - D. Karena keluarga mengutamakan teknologi modern

Pembahasan: Jawaban A. Penting untuk memahami peran keluarga dalam landasan sosiologis Pendidikan Pancasila karena keluarga adalah sumber utama nilai-nilai sosial yang pertama kali dikenalkan kepada individu. Keluarga berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh anak-anak. Melalui interaksi sehari-hari, anak-anak belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan rasa hormat, yang semuanya merupakan elemen penting dari Pancasila. Pendidikan di sekolah kemudian melanjutkan dan memperkuat nilai-nilai ini. Kerjasama antara keluarga dan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diajarkan dan dipraktikkan secara konsisten.

8. Bagaimana sekolah dapat mendukung pengembangan nilai-nilai sosiologis yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila?
- A. Dengan fokus pada pengajaran keterampilan teknis
 - B. Dengan menyediakan fasilitas olahraga

C. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung

D. Dengan mengurangi waktu belajar siswa

Pembahasan: Jawaban C. Sekolah dapat mendukung pengembangan nilai-nilai sosiologis yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Lingkungan belajar yang inklusif memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima dan dihargai, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau agama mereka. Ini membantu mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan persatuan. Selain itu, lingkungan yang mendukung mendorong interaksi positif antara siswa, guru, dan staf sekolah. Melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, dan mengembangkan empati. Dengan demikian, sekolah memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai sosiologis yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila, membantu siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

9. Apa peran guru dalam mengintegrasikan landasan sosiologis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila?

A. Mengajarkan hanya teori-teori akademis

B. Menjadi model perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

C. Mengutamakan prestasi akademik siswa

D. Menggunakan teknologi modern dalam pengajaran

Pembahasan: Jawaban B. Peran guru dalam mengintegrasikan landasan sosiologis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila sangat penting. Guru harus menjadi model perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menunjukkan melalui tindakan mereka sendiri bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan kerjasama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi teladan yang baik, guru membantu siswa untuk memahami dan

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran nilai-nilai sosiologis. Ini termasuk memfasilitasi diskusi yang terbuka dan menghormati, mendorong kerja sama di antara siswa, dan mendukung siswa dalam memahami dan mengatasi isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan cara ini, guru memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa landasan sosiologis Pendidikan Pancasila diterapkan secara efektif.

10. Bagaimana pendidikan Pancasila dapat berkontribusi pada pembangunan sosial di Indonesia?

- A. Dengan fokus pada pengajaran matematika dan sains
- B. Dengan membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas
- C. Dengan mengutamakan ujian dan tes
- D. Dengan mempromosikan penggunaan teknologi terbaru

Pembahasan: Jawaban B. Pendidikan Pancasila dapat berkontribusi pada pembangunan sosial di Indonesia dengan membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Pendidikan Pancasila menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang penting, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kerja sama, yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan berkomitmen untuk berkontribusi positif. Selain itu, pendidikan Pancasila juga membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ini penting dalam konteks pembangunan sosial, karena individu yang berkarakter kuat dan memiliki keterampilan sosial yang baik lebih mampu berperan aktif dalam menyelesaikan masalah sosial, mempromosikan perdamaian, dan menciptakan perubahan positif di komunitas mereka. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya mendidik siswa untuk

menjadi cerdas secara akademis, tetapi juga untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas, yang siap berkontribusi pada pembangunan sosial di Indonesia.

3.7 Landasan Psikologis

Landasan psikologis Pendidikan Pancasila merupakan pemahaman tentang hakikat manusia dan kebutuhan psikologisnya yang menjadi dasar perumusan Pancasila. Memahami landasan psikologis ini penting untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dalam diri manusia, serta mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. Manusia adalah makhluk biopsikososial yang memiliki kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial. Kebutuhan psikologis manusia antara lain:

1. Kebutuhan Rasa Aman: Kebutuhan untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya.
2. Kebutuhan Rasa Cinta dan Penghargaan: Kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dan diakui oleh orang lain.
3. Kebutuhan Aktualisasi Diri: Kebutuhan untuk mencapai potensi diri dan mewujudkan cita-cita.

Pancasila dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan psikologis manusia. Nilai-nilai psikologis yang terkandung dalam Pancasila antara lain:

1. Nilai Ketuhanan: Menumbuhkan rasa aman dan ketenangan jiwa dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nilai Kemanusiaan: Menghormati hak asasi manusia dan menghargai martabat manusia yang setara.

3. Nilai Persatuan: Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk bersatu padu, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Nilai Kerakyatan: Mendorong partisipasi dan rasa tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan keadilan sosial, sehingga tercipta rasa dihargai dan diakui sebagai bagian dari masyarakat.
5. Nilai Keadilan: Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga tercipta rasa aman dan terlindungi dari bahaya dan rasa aktualisasi diri.

Nilai-nilai psikologis Pancasila dapat diterapkan dalam Pendidikan Pancasila melalui berbagai metode, antara lain:

1. Penanaman Nilai-nilai Moral: Menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi.
2. Pengembangan Kepribadian: Membantu peserta didik dalam mengembangkan kepribadian yang berakhlak mulia, bermartabat, dan berjiwa Pancasila.
3. Penanaman Jiwa Nasionalisme: Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk bersatu padu demi mencapai cita-cita bersama.
4. Pengembangan Keterampilan Sosial: Membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan.

Evaluasi

1. Manakah yang bukan merupakan tujuan penerapan landasan psikologis dalam pendidikan Pancasila?

- A. Mengembangkan kepribadian peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- B. Membentuk peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berbudi luhur.
- C. Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan handal.
- D. Membina peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pembahasan: Jawaban C. Landasan psikologis dalam pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman, berakhlak mulia, berbudi luhur, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pilihan C, yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja yang terampil dan handal, merupakan tujuan pendidikan dan pelatihan, bukan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila fokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai Pancasila, sedangkan pendidikan dan pelatihan fokus pada pengembangan keterampilan dan keahlian untuk bekerja.

2. Manakah aspek psikologis yang paling mendasar dalam pendidikan Pancasila?
- A. Aspek kognitif
 - B. Aspek afektif
 - C. Aspek psikomotorik
 - D. Aspek sosial

Pembahasan: Jawaban B. Aspek psikologis yang paling mendasar dalam pendidikan Pancasila adalah aspek afektif. Aspek afektif berkaitan dengan perasaan, emosi, dan nilai-nilai. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Aspek kognitif (pengetahuan), aspek psikomotorik (keterampilan), dan aspek sosial (kemampuan

bersosialisasi) juga penting dalam pendidikan Pancasila, tetapi aspek afektif merupakan dasar yang fundamental untuk pengembangan karakter dan nilai-nilai Pancasila.

3. Manakah teori belajar yang paling tepat untuk diterapkan dalam pendidikan Pancasila?

- A. Behaviorisme
- B. Kognitivisme
- C. Konstruktivisme
- D. Humanisme

Pembahasan: Jawaban C. Teori belajar yang paling tepat untuk diterapkan dalam pendidikan Pancasila adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalamannya. Teori behaviorisme dan kognitivisme lebih fokus pada transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik, sedangkan teori humanisme lebih fokus pada pengembangan potensi dan aktualisasi diri peserta didik. Pendidikan Pancasila membutuhkan pendekatan yang lebih aktif dan partisipatif, sehingga teori konstruktivisme lebih sesuai untuk diterapkan.

4. Bagaimana cara guru dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pada peserta didik melalui pendidikan Pancasila?

- A. Memberikan ceramah tentang sejarah bangsa Indonesia.
- B. Membawa peserta didik mengunjungi tempat-tempat bersejarah.
- C. Mendorong peserta didik untuk mengikuti kegiatan pramuka.
- D. Melakukan semua hal di atas.

Pembahasan: Jawaban D. Cara yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada peserta didik melalui pendidikan Pancasila adalah dengan melakukan semua hal di atas. Ceramah tentang sejarah bangsa Indonesia dapat memberikan pengetahuan tentang perjuangan para pahlawan dan nilai-nilai

patriotisme. Kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dapat memberikan pengalaman langsung dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Kegiatan pramuka dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, disiplin, dan kerjasama. Kombinasi berbagai metode dan kegiatan akan memberikan hasil yang lebih optimal dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air pada peserta didik.

5. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung pendidikan Pancasila di sekolah?

A. Mengantar dan menjemput anak ke sekolah setiap hari.

B. Memastikan anak mengerjakan PR dengan baik.

C. Memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Melakukan semua hal di atas.

Pembahasan: Jawaban D. Peran orang tua dalam mendukung pendidikan Pancasila di sekolah sangatlah penting. Orang tua dapat mendukung dengan melakukan semua hal di atas. Mengantar dan menjemput anak ke sekolah setiap hari menunjukkan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak. Memastikan anak mengerjakan PR dengan baik menunjukkan tanggung jawab orang tua dalam mendukung proses belajar anak. Memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menjadi teladan bagi anak dan membantu mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

6. Manakah teori belajar yang paling sesuai untuk diterapkan dalam pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila?

A. Behaviorisme

B. Kognitivisme

C. Konstruktivisme

D. Humanisme

Pembahasan: Jawaban C. Teori belajar yang paling sesuai untuk diterapkan dalam pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan

bahwa belajar adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalamannya. Pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter mulia pada peserta didik, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Pilihan A, yaitu behaviorisme, lebih fokus pada pembentukan perilaku melalui penguatan dan hukuman. Pilihan B, yaitu kognitivisme, lebih fokus pada proses mental seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Pilihan D, yaitu humanisme, lebih fokus pada pengembangan potensi dan aktualisasi diri peserta didik. Teori konstruktivisme memberikan kerangka yang tepat untuk pendidikan karakter karena memungkinkan peserta didik untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, merefleksikan pengalamannya, dan membangun pengetahuannya sendiri tentang nilai-nilai dan karakter.

7. Bagaimana cara guru dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pada peserta didik melalui pendidikan Pancasila, kecuali?

- A. Menceritakan kisah-kisah pahlawan nasional.
- B. Mengadakan kegiatan upacara bendera dan tidak menyanyikan lagu kebangsaan.
- C. Membawa peserta didik mengunjungi tempat-tempat bersejarah.
- D. Melakukan semua hal di atas.

Pembahasan: Jawaban B. Menumbuhkan rasa cinta tanah air pada peserta didik merupakan salah satu tujuan penting pendidikan Pancasila. Guru dapat mencapai tujuan ini dengan melakukan semua hal di atas kecuali bagian B. Menceritakan kisah-kisah pahlawan nasional dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Mengadakan kegiatan upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada peserta didik. Membawa peserta didik mengunjungi tempat-tempat bersejarah dapat memberikan

pengalaman langsung dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Kombinasi berbagai metode dan kegiatan akan memberikan hasil yang lebih optimal dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air pada peserta didik.

8. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila di sekolah?

- A. Mengantar dan menjemput anak ke sekolah setiap hari.
- B. Memastikan anak mengerjakan PR dengan baik.
- C. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak.
- D. Melakukan komunikasi yang baik dengan guru tentang perkembangan karakter anak.

Pembahasan: Jawaban C. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila di sekolah. Selain melakukan hal-hal yang disebutkan dalam pilihan A dan B, yaitu mengantar dan menjemput anak ke sekolah setiap hari dan memastikan anak mengerjakan PR dengan baik, orang tua juga dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak, serta melakukan komunikasi yang baik dengan guru tentang perkembangan karakter anak. Memberikan contoh dan teladan yang baik merupakan cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter mulia pada anak, karena mereka akan melihat dan mencontoh perilaku orang tuanya. Melakukan komunikasi yang baik dengan guru akan membantu orang tua untuk memahami perkembangan karakter anak di sekolah dan bekerja sama dengan guru untuk mendukung perkembangan karakter anak secara menyeluruh.

9. Bagaimana cara mengatasi hambatan internal dalam pengembangan karakter pada peserta didik melalui pendidikan Pancasila?

- A. Memberikan hukuman yang tegas kepada peserta didik yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- B. Melakukan pendekatan individual kepada peserta didik untuk memahami karakter dan kebutuhannya.
- C. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peserta didik untuk mengembangkan karakternya.
- D. Melakukan semua hal di atas.

Pembahasan: Jawaban D. Hambatan internal dalam pengembangan karakter pada peserta didik melalui pendidikan Pancasila dapat diatasi dengan melakukan semua hal di atas. Memberikan hukuman yang tegas mungkin dapat membuat peserta didik patuh, tetapi tidak menjamin bahwa mereka akan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Melakukan pendekatan individual kepada peserta didik untuk memahami karakter dan kebutuhannya akan membantu guru untuk memberikan pembinaan dan bimbingan yang tepat bagi setiap peserta didik. Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peserta didik untuk mengembangkan karakternya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan contoh dan teladan, memberikan nasihat dan saran, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

10. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor yang memengaruhi perkembangan kepribadian peserta didik?
- A. Faktor keturunan
 - B. Faktor lingkungan
 - C. Faktor budaya
 - D. Faktor ekonomi

Pembahasan: Jawaban D. Kepribadian peserta didik dibentuk oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi faktor keturunan dan fisiologis, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, budaya, sosial, dan ekonomi. Pilihan D, yaitu faktor ekonomi, secara tidak langsung dapat memengaruhi perkembangan kepribadian peserta didik. Namun, faktor ekonomi bukan merupakan faktor penentu utama dalam pembentukan kepribadian. Faktor-faktor lain seperti lingkungan, budaya, dan

sosial memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai pada diri peserta didik. Misalnya, peserta didik yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan harmonis cenderung memiliki kepribadian yang lebih positif dan optimis, dibandingkan dengan peserta didik yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan dan konflik.

2.8 Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis Pendidikan Pancasila merupakan pemahaman tentang cara yang tepat untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Memahami landasan pedagogis ini penting untuk memastikan bahwa Pendidikan Pancasila dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuannya. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk:

1. Membentuk manusia Indonesia yang berpancasila: Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Pancasila, serta memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengembangkan kepribadian bangsa: Pendidikan Pancasila diharapkan dapat membantu mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, bermartabat, dan berjiwa Pancasila.
3. Mempersiapkan generasi muda: Pendidikan Pancasila diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila dan mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pendidikan Pancasila harus dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip pedagogis, antara lain:

1. Berpusat pada peserta didik: Pendidikan Pancasila harus berpusat pada peserta didik, dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka.
2. Berorientasi pada pengembangan karakter: Pendidikan Pancasila harus berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik yang berakhlak mulia, bermartabat, dan berjiwa Pancasila.
3. Menggunakan metode yang bervariasi: Pendidikan Pancasila harus menggunakan metode yang bervariasi dan menarik, seperti ceramah, diskusi, simulasi, dan permainan peran.
4. Menciptakan suasana belajar yang kondusif: Pendidikan Pancasila harus menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
5. Melibatkan berbagai pihak: Pendidikan Pancasila harus melibatkan berbagai pihak, seperti guru, orang tua, dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam Pendidikan Pancasila antara lain:

1. Ceramah: Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan penjelasan yang jelas dan menarik.
2. Diskusi: Peserta didik berdiskusi untuk mengkaji dan memahami materi pembelajaran.
3. Simulasi: Peserta didik memerankan berbagai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
4. Permainan peran: Peserta didik memainkan peran dalam situasi dan kondisi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
5. Studi kasus: Peserta didik menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
6. Proyek: Peserta didik mengerjakan proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

Penilaian dalam Pendidikan Pancasila harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

1. Pengetahuan: Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai Pancasila.
2. Keterampilan: Penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sikap: Penilaian terhadap sikap peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi

1. Mengapa penting bagi Pendidikan Pancasila untuk memiliki landasan pedagogis yang kuat?
 - A. Untuk meningkatkan keterampilan teknis siswa
 - B. Untuk mempromosikan teknologi dalam pendidikan
 - C. Untuk memastikan pengajaran yang efektif dan pembentukan karakter siswa
 - D. Untuk mengurangi waktu belajar di sekolah

Pembahasan: Jawaban C. Penting bagi Pendidikan Pancasila untuk memiliki landasan pedagogis yang kuat karena landasan ini memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Landasan pedagogis mencakup prinsip-prinsip dan teori pendidikan yang membantu guru dalam merancang kurikulum, memilih strategi pengajaran, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Dengan landasan pedagogis yang kuat, pengajaran Pendidikan Pancasila dapat dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan terarah, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, landasan pedagogis yang kuat juga berperan penting dalam pembentukan karakter siswa. Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti

kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama. Dengan pendekatan pedagogis yang tepat, guru dapat membantu siswa mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter baik dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat.

2. Bagaimana prinsip belajar aktif diterapkan dalam Pendidikan Pancasila?

- A. Dengan fokus pada ceramah guru
- B. Dengan memberikan tugas hafalan
- C. Dengan melibatkan siswa dalam diskusi dan kegiatan kelompok
- D. Dengan mengutamakan ujian tertulis

Pembahasan: Jawaban C. Prinsip belajar aktif diterapkan dalam Pendidikan Pancasila dengan melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Ini bisa dilakukan melalui diskusi, kerja kelompok, studi kasus, dan proyek kolaboratif. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan ini, mereka tidak hanya mendengarkan dan menghafal informasi, tetapi juga terlibat dalam berpikir kritis, berdebat, dan memecahkan masalah bersama teman-teman mereka. Pendekatan ini membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam. Belajar aktif juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Dalam diskusi dan kegiatan kelompok, siswa belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan memahami perspektif yang berbeda. Hal ini sangat penting dalam Pendidikan Pancasila, karena nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan demokrasi hanya bisa dipahami dan diterapkan secara efektif melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung.

3. Apa peran evaluasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila?

- A. Mengukur kemampuan teknis siswa
- B. Menentukan prestasi akademik siswa
- C. Menilai pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan perkembangan karakter mereka
- D. Mengutamakan nilai ujian tertulis

Pembahasan: Jawaban C. Evaluasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila berperan penting untuk menilai pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan perkembangan karakter mereka. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan siswa, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Guru harus mampu menilai sejauh mana siswa telah menginternalisasi nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan memahami konsep tertentu atau belum menunjukkan perubahan perilaku yang diharapkan, guru dapat merancang ulang strategi pengajaran atau memberikan bimbingan tambahan. Dengan demikian, evaluasi dalam Pendidikan Pancasila berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan maupun pembentukan karakter.

4. Mengapa penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh mata pelajaran di sekolah?

- A. Untuk meningkatkan prestasi akademik siswa
- B. Untuk mempromosikan penggunaan teknologi
- C. Untuk membentuk karakter siswa secara holistik

D. Untuk mengurangi beban belajar siswa

Pembahasan: Jawaban C. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh mata pelajaran di sekolah penting untuk membentuk karakter siswa secara holistik. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga untuk mengembangkan karakter yang kuat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dalam berbagai mata pelajaran, siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam berbagai konteks dan situasi. Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh mata pelajaran membantu siswa melihat keterkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan nyata. Misalnya, nilai keadilan dapat diajarkan dalam pelajaran sejarah melalui studi kasus tentang perjuangan hak asasi manusia, atau nilai kerjasama dapat diperkuat dalam pelajaran sains melalui kerja kelompok dalam eksperimen. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang nilai-nilai Pancasila secara teoretis, tetapi juga mempraktikkannya dalam berbagai aspek kehidupan mereka, membantu mereka menjadi individu yang berkarakter kuat dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat.

5. Bagaimana landasan pedagogis membantu guru dalam merancang kurikulum Pendidikan Pancasila?

- A. Dengan fokus pada penggunaan teknologi modern
- B. Dengan menentukan materi pelajaran yang bersifat teoritis
- C. Dengan memberikan panduan tentang metode pengajaran dan penilaian yang efektif
- D. Dengan mengurangi waktu belajar siswa

Pembahasan: Jawaban C. Landasan pedagogis membantu guru dalam merancang kurikulum Pendidikan Pancasila dengan memberikan panduan tentang metode pengajaran dan penilaian

yang efektif. Landasan pedagogis mencakup berbagai teori dan prinsip pendidikan yang dapat digunakan guru untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ini termasuk pemilihan metode pengajaran yang dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih efektif, seperti diskusi, kerja kelompok, dan proyek kolaboratif. Selain itu, landasan pedagogis juga memberikan panduan tentang bagaimana melakukan penilaian yang komprehensif dan holistik. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap aspek afektif dan psikomotorik, sehingga guru dapat menilai sejauh mana siswa telah mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, landasan pedagogis berperan penting dalam memastikan bahwa kurikulum Pendidikan Pancasila tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa secara menyeluruh, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

6. Apa tujuan utama dari pendekatan pedagogis dalam Pendidikan Pancasila?
- A. Meningkatkan keterampilan teknis siswa
 - B. Menyediakan fasilitas teknologi terbaru
 - C. Mengembangkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila
 - D. Mengutamakan hasil ujian

Pembahasan: Jawaban C. Pendekatan pedagogis dalam Pendidikan Pancasila bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengerti konsep-konsep teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengajaran yang interaktif dan kontekstual, seperti diskusi, simulasi, dan proyek kolaboratif,

digunakan untuk membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Selain itu, pendekatan pedagogis juga berfokus pada pengembangan karakter siswa. Melalui pengajaran yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, siswa diajarkan untuk menjadi individu yang beretika, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pribadi siswa, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. Dengan demikian, pendekatan pedagogis dalam Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk generasi penerus yang memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan bangsa.

7. Bagaimana penggunaan metode belajar berbasis proyek dapat mendukung pendidikan nilai-nilai Pancasila?
- A. Dengan meningkatkan keterampilan teknis siswa
 - B. Dengan memberikan pengalaman langsung dalam penerapan nilai-nilai Pancasila
 - C. Dengan mengurangi beban belajar siswa
 - D. Dengan fokus pada teori dan konsep akademis

Pembahasan: Jawaban B. Penggunaan metode belajar berbasis proyek dapat mendukung pendidikan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Melalui proyek-proyek kolaboratif, siswa dapat belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan mengatasi permasalahan bersama-sama. Proyek-proyek ini dapat dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, metode belajar berbasis proyek mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan mengambil tanggung jawab atas hasil kerja mereka. Ini membantu mengembangkan sikap proaktif dan kreatif

yang penting dalam pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan mendapatkan pengalaman praktis, siswa tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut secara teoritis, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi, sehingga mereka lebih siap untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

8. Apa peran refleksi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila?
- A. Mengurangi waktu belajar di kelas
 - B. Meningkatkan keterampilan teknis siswa
 - C. Membantu siswa memahami dan mengevaluasi nilai-nilai yang mereka pelajari
 - D. Mengutamakan hasil ujian tertulis

Pembahasan: Jawaban C. Refleksi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berperan penting untuk membantu siswa memahami dan mengevaluasi nilai-nilai yang mereka pelajari. Melalui refleksi, siswa diajak untuk merenungkan pengalaman belajar mereka, memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata, dan mengevaluasi sejauh mana mereka telah menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Proses refleksi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi kelompok, jurnal reflektif, atau esai. Selain itu, refleksi juga membantu siswa untuk menyadari kekuatan dan kelemahan mereka dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan merenungkan tindakan dan keputusan mereka, siswa dapat belajar dari pengalaman mereka dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Ini penting untuk pengembangan karakter yang berkelanjutan, karena refleksi mendorong siswa untuk terus berusaha menjadi individu yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, refleksi adalah bagian integral dari pembelajaran Pendidikan Pancasila yang membantu siswa untuk tumbuh secara moral dan etis.

9. Bagaimana pendekatan pembelajaran kontekstual dapat mendukung Pendidikan Pancasila?
- A. Dengan fokus pada hafalan materi
 - B. Dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa
 - C. Dengan mengurangi interaksi sosial di kelas
 - D. Dengan mengutamakan ujian dan tes

Pembahasan: Jawaban B. Pendekatan pembelajaran kontekstual dapat mendukung Pendidikan Pancasila dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan ini membantu siswa melihat relevansi dan aplikasi nyata dari apa yang mereka pelajari, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dalam pembelajaran tentang keadilan sosial, guru dapat menggunakan contoh-contoh konkret dari kehidupan masyarakat untuk menjelaskan konsep tersebut. Selain itu, pendekatan pembelajaran kontekstual juga mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan berinteraksi dalam proses pembelajaran. Dengan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar mereka, siswa menjadi lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Hal ini membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran kontekstual memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

10. Mengapa penting untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan nilai-nilai Pancasila?
- A. Untuk meningkatkan prestasi akademik siswa

- B. Untuk memastikan konsistensi pendidikan nilai antara sekolah dan rumah
- C. Untuk mempromosikan penggunaan teknologi modern
- D. Untuk mengurangi beban kerja guru

Pembahasan: Jawaban B. Melibatkan orang tua dalam pendidikan nilai-nilai Pancasila penting untuk memastikan konsistensi antara pendidikan yang diberikan di sekolah dan yang diterapkan di rumah. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan harus diajarkan dan diperkuat baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Ketika orang tua terlibat dalam proses pendidikan, mereka dapat mendukung dan memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, sehingga anak-anak mendapatkan pesan yang konsisten dan jelas tentang pentingnya nilai-nilai tersebut. Selain itu, keterlibatan orang tua juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih holistik dan terintegrasi. Orang tua dapat memberikan contoh langsung tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan emosional dan moral yang diperlukan untuk perkembangan karakter anak. Dengan adanya dukungan dan keterlibatan orang tua, pendidikan nilai-nilai Pancasila dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar dalam pembentukan karakter anak-anak.

REFERENSI

- Azra, A. (2006). *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Budiyono, B. (2018). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 12-20.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Depdiknas.
- Kaelan, K. (2012). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Komarudin, K. (2017). Pancasila sebagai Paradigma Pendidikan Nasional. *Jurnal Filsafat*, 27(1), 1-15.
- Muladi, M. (2019). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(2), 45-56.
- Notonagoro, N. (1984). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, T. (2018). Konseptualisasi Pancasila sebagai Basis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pancasila dan Kebangsaan*, 10(2), 67-82.
- Sukarno. (1945). *Pidato Lahirnya Pancasila*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. (2011). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

BIOGRAFI PENULIS

Fadhlul Mubarak adalah Dosen Statistika di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dia menamatkan pendidikan di S1 Statistika Universitas Hasanuddin, S2 Statistika Terapan Institut Pertanian Bogor, dan S3 Statistika Terapan di Eskisehir Technical University & Bisnis di Universitas Anadolu. Dia adalah salah satu dosen yang aktif menulis baik program komputer, buku, modul, artikel, dll (Anggraini & Mubarak, 2024; Auliah et al., 2023; Hardiati & Mubarak, 2022; Mubarak, 2024a, 2024b; Mubarak, Aslanargun, & Siklar, 2022; Mubarak, Aslanargun, & Sundara, 2022; Mubarak, Aslanargun, et al., 2024; Mubarak et al., 2021, 2021; Mubarak, Nurniswah, et al., 2024; Mubarak, Sumertajaya, et al., 2017; Mubarak, Sundara, et al., 2024; Mubarak, Wulandya, et al., 2017; Mubarak & Aslanargun, 2022; Mubarak & Maharani, 2024; Mubarak & Sundara, 2024a, 2024b; Murfadiyah et al., 2023; Nasution et al., 2023; Nengsih et al., 2020, 2023; Setiawan & Mubarak, 2022; Ulma et al., 2024; Wahyuni et al., 2023).

Anggraini, S., & Mubarak, F. (2024). Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Luas Lahan dan Jumlah Produksi Padi dengan Single Linkage. *Media Edukasi Data Ilmiah Dan Analisis (MEDIAN)*, 7(02), 17–23.

Auliah, U., Rafidah, R., & Mubarak, F. (2023). Penerapan metode ARIMA terhadap perkiraan harga saham pada perusahaan Bank Syariah Indonesia (BSI). *EJournal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 41–48.

Hardiati, K., & Mubarak, F. (2022). Analisis Harga Saham pada Beberapa Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 443–462.

Mubarak, F. (2024a). *Modul Ajar Pancasila (Jilid 2)*.

Mubarak, F. (2024b). *Modul Ajar Pengantar Agribisnis (Jilid 1)*.

- Mubarak, F., & Aslanargun, A. (2022). GSTARIMA Model with Missing Value for Forecasting Gold Price. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 6(1), 90–100.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., & Siklar, I. (2021). The Best K-Exponential Moving Average with Missing Values: Gold Prices in Indonesia, Saudi Arabia, and Turkey during COVID-19. *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics*, 2021(1), 334–342.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., & Siklar, I. (2021). *High Order Spatial Weighting Matrix Using Google Trends*.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., & Siklar, İ. (2022). Higher-Order Spatial Classification Using Google Trends Data during Covid-19. *Advances and Applications in Statistics*, 78, 93–103.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., & Sundara, V. Y. (2022). Village Potential Statistics (PODES): Visualization of Schools in Jambi Province with Statistical Programming (R). *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 2(2), 86–96.
- Mubarak, F., Aslanargun, A., Sundara, V. Y., & Nurniswah, N. (2024). Text Mining: Absolute Advantage Research at Scopus. *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 149–168.
- Mubarak, F., & Maharani, I. (2024). Analysis of Rubber Farming Income using Stimulants in Tebo District. *International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress*, 502–503.
- Mubarak, F., Nurniswah, N., Sundara, V. Y., Ulma, R. O., & Prasaja, A. S. (2024). PODES: Sebuah Paket Pemograman Potensi Desa di Indonesia. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 4(2), 106–116.

- Mubarak, F., Sumertajaya, I., & Aidi, M. N. (2017). The best spatial weight matrix order of radius for GSTARIMA. *International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR)*, 7(2), 494–497.
- Mubarak, F., & Sundara, V. Y. (2024a). Forecasting the Price of Rice in Banda Aceh after Covid-19. *ArXiv Preprint ArXiv:2411.15228*.
- Mubarak, F., & Sundara, V. Y. (2024b). IFPD: An R Package for Indonesia Food Prices Data. *International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress*, 247–250.
- Mubarak, F., Sundara, V. Y., & Aslanargun, A. (2024). The Best Moving Average Smoothing for GSTAR Model with Missing Value. *Multi Proximity: Jurnal Statistika*, 3(2), 61–67.
- Mubarak, F., Wulandya, S. A., Seran, K., & Soleh, A. M. (2017). Pemodelan Terbaik dan Peramalan Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 217–228.
- Murfadiyah, E., Hafiz, A. P., & Mubarak, F. (2023). Perkiraan harga saham pada Perusahaan Astra Internasional Tbk. menggunakan metode moving average. *EJournal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 49–58.
- Nasution, R. F., Rafidah, R., & Mubarak, F. (2023). Perkiraan harga saham pada perusahaan aneka tambang dengan metode double exponential smoothing. *EJournal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 59–68.
- Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The impact of Islamic financial development, GDP, and population on environmental quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(1), 7–13.
- Nengsih, T. A., Mubarak, F., & Sundara, V. Y. (2020). *Pemograman R Dasar*. Fp Aswaja.

- Setiawan, A. S. A., & Mubarak, F. (2022). Analisis Volume Saham Pada Saat Covid-19 Menggunakan Metode Regresi Dengan Teknik Imputasi. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(1), 33-44.
- Ulma, R. O., Nainggolan, S., Napitupulu, R. R. P., Listyarini, D., & Mubarak, F. (2024). Optimalisasi Potensi Lokal: Pemanfaatan Serbuk Kayu Dan Serasah menjadi Pupuk Organik Komersial di Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. *Melayani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 77-84.
- Wahyuni, E. D., Rafidah, R., & Mubarak, F. (2023). Analisis harga saham pada PT. BTPN Syariah Tbk dengan metode EMA (exponential moving average) Tahun 2020-2022. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(1), 29-38.

